

LAPORAN AKHIR

**PROGRAM INSENTIF
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI T.A. 2010**

**RAGAM KONFLIK DI INDONESIA:
CORAK DASAR DAN
RESOLUSINYA**



Oleh :

1. Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, MSc.,Ph.D.
2. Prof. Achmad Fedyani Saifudin
3. Ir. Pardamenta Kaban
4. Drs. Ruddy Agusyanto, M.A.
5. Ir. Ety Sulistyawati, MSi.

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan, Telp/Fax: 75903426

Jakarta, November 2010



**RAGAM KONFLIK DI INDONESIA:
CORAK DASAR DAN RESOLUSINYA**

Lilik Hendrajaya, Ir. M.Sc, Ph.D, Prof (Koordinator Peneliti)

Achmad Fedyani Saifudin, Prof. (Peneliti)

Pardamenta Kaban, Ir. (Peneliti)

Ruddy Agusyanto, Drs. MA (Peneliti)

Etty Sulistyawati, Ir, M.Si (Peneliti)

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Ragam Konflik Di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya.
2. Ketua Peneliti :
 - a) Nama lengkap : Lilik Hendrajaya, Ir, M.Sc, Ph.D, Prof
 - b) Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c) NIP : 130 367 158
 - d) Jabatan Akademik : Guru Besar ITB dalam Fisika Bumi
 - e) Jabatan Struktural : -
 - f) Alamat Kantor : Jl. Jati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan
 - g) Telepon / Fax : 7695006 / (021)7502087
 - h) Publikasi : - Model Momentum Ketahanan Nasional
- Kecerdasan Magnetik
- Strategi Pengembangan Kompetensi dan Institusi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
3. Jangka waktu penelitian : 10 bulan
4. Lokasi Penelitian : Jakarta, Aceh, Poso
5. Jumlah Biaya yang Diajukan : Rp. 125.000.000,-

Jakarta, 2010

Mengetahui,

Kepala Balitbang Kemhan



Dr. Ir. Pos. M. Mutabarot, M.A

Koordinator Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lilik Hendrajaya', is written over a horizontal line.

Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc, Ph.D

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Ragam Konflik Di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya.
2. Ketua Peneliti :
- a) Nama lengkap : Lilik Hendrajaya, Ir,M.Sc,PhD,Prof
 - b) Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c) NIP : 130 367 158
 - d) Jabatan Akademik : Gurubesar ITB dalam Fisika Bumi
 - e) Jabatan Struktural : -
 - f) Alamat Kantor : Jl. Jati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan
 - g) Telepon / Faks : (021) 7502087
 - h) E-mail :
3. Tim Peneliti :

No	Nama & Gelar Akademik	Jabatan Dalam Penelitian	Bidang	Instansi	Alokasi Waktu (Jam/mgg)
1.	Prof.Ir.Lilik Hendrajaya,M.Sc,PhD	Koordinator Peneliti	Kebumian	Balitbang Kemhan	8
2.	Prof. Achmad Fedyani Saifudin.	Peneliti	Sosbud	Kemhan	8
3.	Ir. Pardamenta Kaban	Peneliti	Teknik	Balitbang Kemhan	8
4.	Drs. Ruddy Agusyanto, MA	Peneliti	Sosbud	Universitas Indonesia	8
5.	Ir. Ety Sulistyawati, M.Si.	Peneliti	Strategi Pertahanan	Balitbang Kemhan	8

RINGKASAN

Konflik yang merebak di Indonesia merupakan konflik komunal (horizontal) yang berbasis isu agama dan etnis serta faktor tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Pengalaman dimanapun, konflik yang berbasis isu agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan aktor lintas regional serta sangat sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut karena konflik yang berbasis isu agama dan etnik cenderung melampaui batas-batas geografis dan tidak mudah untuk dinegosiasikan serta tidak rasional.

Sedangkan penyebab terjadinya konflik di daerah perbatasan, dapat juga disebut sebagai konflik vertikal adalah : (1) Ketidak seimbangan pembangunan, (2) Pengerukan sumber daya alam, (3) Kekerasan pada rakyat, (4) Kuatnya etnisitas pada masyarakat setempat, (5) Jauh dari pusat pemerintahan, (6) Modernisasi yang keliru atau dipaksakan, (7) Distribusi ekonomi, posisi, atau jabatan yang tidak seimbang, (8) Persepsi yang keliru dari pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal.

Dua hal tersebut bagi masyarakat Indonesia adalah survival unit atau identitas yang paling sakral. Fakta politik menunjukkan pada saat kran demokrasi dibuka dan sangat kencang diputar pada awal reformasi, maka konflik di beberapa belahan daerah di Indonesia bermunculan. Dalam naskah ini yang dibahas mengenai akar permasalahan dari konflik yang terjadi di Poso dan konflik daerah perbatasan Papua - PNG, selain itu juga membuat strategi penanganannya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang terjadi di tanah air selalu melakukan pendekatan keamanan. Namun hasil yang dicapai belum maksimal. Untuk pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali dipinggirkan, padahal masyarakat yang mengalami konflik memiliki kearifan lokal yang bermakna luhur untuk menciptakan keharmonisan dan perdamaian masyarakatnya. Dan masih adanya kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang sering membuat masyarakat mudah tersulut konflik.

Untuk mewujudkan dan mengaplikasikan strategi penanganan potensi konflik, perlu beberapa tahap, yaitu: Penanganan jangka pendek hendaknya dilakukan dengan cara melaksanakan dan melanjutkan pelaksanaan *Sintuwu Maroso* (Poso). Dan penanganan jangka menengah dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di daerah (Poso dan Papua),

peningkatan otonomi daerah yang diperluas dimana pemerintah pusat hendaknya mengurangi kebijakan yang sentralistik dengan prinsip *Top Down Policy*. Yang pada akhirnya diperlukan kebijakan kriminal pemerintah (di daerah) yang dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, seperti norma hukum, norma agama, adat dan kebudayaan. Juga dibutuhkan kebijakan pemerintah mengenai kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi serta ketentuan-ketentuan dan peluang berusaha yang memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan, tanpa berpihak pada kelompok manapun., Perlu adanya pembinaan dibidang kemasyarakatan, terutama penanaman kesadaran jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan-kebijakan terpadu dengan melibatkan kepolisian, TNI, komponen masyarakat, agama dan pemuda melalui upaya sosialisasi kesadaran bela negara dalam keluarga, lingkungan desa atau kota, wilayah melalui jalur pendidikan formal dan informal.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha Esa, dan berkat rahmat Nya, Pngiat dapat menyelesaikan naskah kajian penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tim Peneliti membuat kajian dengan judul " Ragam Konflik di Indonesia : Corak Dasar dan Resolusinya". Judul ini dipilih karena konflik yang terjadi di Indonesia tidak pernah berakhir (jadi bahaya laten) seperti konflik di Poso (konflik horizontal) dan konflik yang terjadi di Wilayah Perbatasan RI (Papua - PNG).

Dalam penyusunan naskah kajian ini telah diusahakan semaksimal mungkin agar substansi penelitian dapat mencapai sebagaimana yang diharapkan. Namun disadari bahwa hasil yang didapat masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan tanggapan guna memperbaiki dan menyempurnakan naskah kajian ini.

Harapan Tim Peneliti agar materi yang terkandung dalam naskah dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

TIM PENELITI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I . PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
BAB II . TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Konflik Mikro	6
2.2. Teori Konflik Makro	8
BAB III . TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1. Tujuan	11
3.2. Manfaat Penelitian	11
BAB IV . METODE PENELITIAN	
4.1. Data dan Sumber Data	13
4.2. Pelaksanaan Kegiatan	13

SUMMARY REPORT

BAB V. PEMBAHASAN

5.1.	Memahami Konflik Sosial	14
5.2.	Kasus Konflik Poso.....	18
5.3.	Kasus Konflik di Perbatasan Papua Indonesia- Papua Niugini.....	29
5.4.	Memetakan Konflik Sosial	40
5.5.	Pedoman Pemodelan.....	40

BAB VI. KESIMPULAN

6.1.	Kesimpulan	45
6.2.	Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

SUMMARY REPORT

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda, sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Konflik didefinisikan sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut.

Masyarakat nasional kita adalah masyarakat majemuk dan kebudayaan di Indonesia yang sangat beragam tinggal di nusantara yang terdiri dari puluhan ribu pulau besar dan kecil, yang dilingkungi lautan yang luas dan daratannya sangat bervariasi dari pantai, pegunungan, hingga hutan belantara. Ciri majemuk itu merupakan fakta yang harus ditanggapi sebagai tantangan besar yang harus ditanggulangi pada masa kini dan masa depan. Dalam konteks sosialbudaya, kemajemukan terwujud dalam konteks etnisitas, keagamaan, rasial dan golongan. Persoalan dan tantangan semakin serius tatkala kesenjangan sosial ekonomi meningkat dalam masyarakat bangsa kita.

Sejalan dengan pemikiran sosial modernitas yang mendominasi dunia hingga akhir abad ke 20 yang lalu, pemikiran sosial dan kebijakan negara kita adalah positivisme yang cenderung memposisikan negara sebagai pengatur dominant atas warga negara. Pemikiran yang bercorak obyektivisme ini cenderung memposisikan warga negara sebagai obyek pembangunan yang serba seragam dan sentralistik. Implikasi dari tersebut adalah diterapkannya kebijakan terhadap realitas keragaman masyarakat dan kebudayaan di Indonesia yang kurang memerhatikan hakikat dan jatidiri setiap kebudayaan yang hidup di nusantara, dan terlalu focus pada kepentingan integrasi yang dibangun dari atas. Akibatnya dalam jangka panjang semenjak jaman Hindia

Belanda hingga sekarang batas-batas antar etnik itu masih kurang mencair. Tidak hanya etnik, tetapi juga batas-batas antar ras, penganut agama, golongan sosial ekonomi.

Konflik-konflik yang berbasis primordialisme masih kerap terjadi di Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti bahwa komunikasi antar etnik, ras, agama, dan golongan masih potensi dan rentan mendorong terjadinya konflik-konflik. Perang antar suku di Papua bukan hanya cetusan sesaat melainkan menjadi tradisi setiap tahun. Konflik di Sambas, Maluku, Sampit, Poso, dan tempat-tempat lain pada awal masa reformasi dapat dipandang sebagai contoh-contoh pentingnya atribut etnik dan agama sebagai basis konflik-konflik. Kita dapat pula menengarai bahwa meredanya konflik-konflik pada waktu belakangan sesungguhnya menyimpan potensi meledak kembali karena batas-batas primordial, hubungan dan komunikasi antar etnik, ras, agama dan golongan belum digarap dengan maksimal.

Konflik etno-nasional atau etno-politik dapat didefinisikan sebagai konflik dimana pihak-pihak yang terlibat mendefinisikan dirinya dengan menggunakan kriteria komunal dan mengemukakan tuntutan-tuntutan atas nama kepentingan kolektif kelompoknya terhadap negara, atau terhadap aktor komunal lainnya. Konflik etnis melibatkan gerakan-gerakan "irredentist" (pencaplokan), 'secessionist' (pemisahan), atau anti colonial. Konflik etno-nasional berdasarkan tiga kriteria, yaitu; (1) konflik itu terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara; (2) salah satu pihak yang berkonflik adalah pemerintah yang sedang berkuasa; dan (3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan yang terus menerus.

Kajian ini meneliti ruang lingkup teori konflik. Bagian yang penting sekali adalah pengantar teori-teori musuh (enemy system), kebutuhan dasar manusia (human needs) dan resolusi konflik untuk menjelaskan konflik. Pembahasan teori konflik ini penting untuk memahami sifat konflik itu sendiri. Untuk menemukan pemecahannya (solusi) terhadap masalah-masalah yang nampaknya tidak kunjung hilang dari berbagai belahan dunia, wilayah teoritis ini perlu dibahas secara mendalam. Pengembangan-pengembangan dalam bidang ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peneliti untuk lebih memahami dan membantu mencari pemecahannya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual yang ada pada masa sekarang. Pemecahan masalah aktual tersebut dilakukan melalui tahapan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, menyusun, menganalisis, interpretasi dan membuat kesimpulan.

Konflik yang merebak di Indonesia merupakan konflik komunal (horizontal) yang berbasis isu agama dan etnis serta faktor tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Pengalaman dimanapun, konflik yang berbasis isu agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan aktor lintas regional serta sangat sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut karena konflik yang berbasis isu agama dan etnik cenderung melampaui batas-batas geografis dan tidak mudah untuk dinegosiasikan serta tidak rasional.

Sedangkan penyebab terjadinya konflik di daerah perbatasan, dapat juga disebut sebagai konflik vertikal adalah : (1) Ketidak seimbangan pembangunan, (2) Pengerukan sumber daya alam, (3) Kekerasan pada rakyat, (4) Kuatnya etnisitas pada masyarakat setempat, (5) Jauh dari pusat pemerintahan, (6) Modernisasi yang keliru atau dipaksakan, (7) Distribusi ekonomi, posisi, atau jabatan yang tidak seimbang, (8) Persepsi yang keliru dari pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal.

Dua hal tersebut bagi masyarakat Indonesia adalah survival unit atau identitas yang paling sakral. Fakta politik menunjukkan pada saat kran demokrasi dibuka dan sangat kencang diputar pada awal reformasi, maka konflik di beberapa belahan daerah di Indonesia bermunculan. Dalam naskah ini yang dibahas mengenai akar permasalahan dari konflik yang terjadi di Poso dan konflik daerah perbatasan Papua - PNG, selain itu juga membuat strategi penanganannya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini pemerintah dalam menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang terjadi di tanah air selalu melakukan pendekatan keamanan. Namun hasil yang dicapai belum maksimal. Untuk pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali dipinggirkan, padahal

masyarakat yang mengalami konflik memiliki kearifan lokal yang bermakna luhur untuk menciptakan keharmonisan dan perdamaian masyarakatnya. Dan masih adanya kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang sering membuat masyarakat mudah tersulut konflik.

Untuk mewujudkan dan mengaplikasikan strategi penanganan potensi konflik, perlu beberapa tahap, yaitu: Penanganan jangka pendek hendaknya dilakukan dengan cara melaksanakan dan melanjutkan pelaksanaan *Sintuwu Maroso* (Poso). Dan penanganan jangka menengah dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di daerah (Poso dan Papua), peningkatan otonomi daerah yang diperluas dimana pemerintah pusat hendaknya mengurangi kebijakan yang sentralistik dengan prinsip *Top Down Policy*. Yang pada akhirnya diperlukan kebijakan kriminal pemerintah (di daerah) yang dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, seperti norma hukum, norma agama, adat dan kebudayaan. Juga dibutuhkan kebijakan pemerintah mengenai kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi serta ketentuan-ketentuan dan peluang berusaha yang memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan, tanpa berpihak pada kelompok manapun., Perlu adanya pembinaan dibidang kemasyarakatan, terutama penanaman kesadaran jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan-kebijakan terpadu dengan melibatkan kepolisian, TNI, komponen masyarakat, agama dan pemuda melalui upaya sosialisasi kesadaran bela negara dalam keluarga, lingkungan desa atau kota, wilayah melalui jalur pendidikan formal dan informal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sepanjang sejarah manusia konflik merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat diatasi secara adil dan proporsional serta hampir mustahil untuk dihilangkan dari muka bumi ini. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda, sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat.

Konflik akibat perbedaan Konflik didefinisikan sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari adanya perbedaan dan melakukan tindakan terhadap kondisi tersebut. Proses-proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan menjadi potensi konflik dengan adanya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Masyarakat nasional kita adalah masyarakat majemuk dan berkebudayaan yang sangat beragam tinggal di nusantara yang terdiri dari puluhan ribu pulau besar dan kecil, yang dilingkungi lautan yang luas dan daratannya sangat bervariasi dari pantai, pegunungan, hingga hutan belantara. Ciri majemuk itu merupakan fakta yang harus ditanggapi sebagai tantangan besar yang harus ditanggulangi pada masa kini dan masa depan. Dalam konteks sosialbudaya, kemajemukan terwujud dalam konteks etnisitas, keagamaan, rasial dan golongan. Persoalan dan tantangan semakin serius tatkala kesenjangan sosial ekonomi meningkat dalam masyarakat bangsa kita.

Fakta kemajemukan bangsa kita sudah dicatat hampir seabad yang lalu oleh seorang ahli ekonomi Hindia Belanda bernama J. Furanivall, menyatakan antara lain : "Kehidupan masyarakat di Hindia tercerai berai dalam lingkungan yang sempit, mereka hidup dalam sukubangsa-sukubangsa yang tegas batas-batasnya satu dengan yang lain. Mereka hanya berkomunikasi di pasar-pasar ketika berjual beli dan kemudian kembali ke basis sukubangsa mereka apabila urusan di pasar sudah selesai".

Pada masa kini, meskipun kita mengakui sudah banyak perubahan, fakta menunjukkan bahwa kemajemukan yang ciri-cirinya antara lain dikemukakan Furnivall di atas masih hadir dominant di banyak tempat di Indonesia. Walaupun interaksi warga antar etnik, agama, ras dan golongan sosial-ekonomi sudah meningkat, khususnya di perkotaan, namun karakter yang lebih mendasar dari kehidupan yang terkotak-kotak itu tetap eksis dalam masyarakat bangsa kita. Salah satu sifat dasar dari kehidupan dengan batas-batas yang tegas itu adalah substansi stereotip (*Stereotype*) dan prasangka (*prejudice*). Stereotip adalah penilaian subyektif suatu masyarakat terhadap masyarakat lain. Stereotip selalu bermuatan dugaan-dugaan negatif yang disebut prasangka yang mengakibatkan batas-batas antar kebudayaan yang bersangkutan terpelihara.

Sejalan dengan pemikiran sosial modernitas yang mendominasi dunia hingga akhir abad ke 20 yang lalu, pemikiran sosial dan kebijakan negara kita adalah positivisme yang cenderung memposisikan negara sebagai pengatur dominant atas warga negara. Pemikiran yang bercorak obyektivisme ini cenderung memposisikan warga negara sebagai obyek pembangunan yang serba seragam dan sentralistik. Implikasi dari tersebut adalah diterapkannya kebijakan terhadap realitas keragaman masyarakat dan kebudayaan di Indonesia yang kurang memerhatikan hakikat dan jatidiri setiap kebudayaan yang hidup di nusantara, dan terlalu focus pada kepentingan integrasi yang dibangun dari atas. Akibatnya dalam jangka panjang semenjak jaman Hindia Belanda hingga sekarang batas-batas antar etnik itu masih kurang mencair. Tidak hanya etnik, tetapi juga batas-batas antar ras, penganut agama, golongan sosial ekonomi.

Konflik-konflik yang berbasis primordialisme masih kerap terjadi di Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti bahwa komunikasi antar etnik, ras, agama, dan golongan masih potensi dan rentan mendorong terjadinya konflik-konflik. Perang antar suku di Papua bukan hanya cetusan sesaat melainkan menjadi tradisi setiap tahun. Konflik di Sambas, Maluku, Sampit, Poso, dan tempat-tempat lain pada awal masa reformasi dapat dipandang sebagai contoh-contoh pentingnya atribut etnik dan agama sebagai basis konflik-konflik.

Kita dapat pula menengarai bahwa meredanya konflik-konflik pada waktu belakangan sesungguhnya menyimpan potensi meledak kembali karena batas-batas primordial, hubungan dan komunikasi antar etnik, ras, agama dan golongan belum digarap dengan maksimal.

Konflik etno-nasional atau etno-politik dapat didefinisikan sebagai konflik dimana pihak-pihak yang terlibat mendefinisikan dirinya dengan menggunakan kriteria komunal dan mengemukakan tuntutan-tuntutan atas nama kepentingan kolektif kelompoknya terhadap negara, atau terhadap aktor komunal lainnya. Konflik etnis melibatkan gerakan-gerakan "*irredentist*" (pencaplokan), '*seccesionist*' (pemisahan), atau anti colonial. Konflik etno-nasional berdasarkan tiga kriteria, yaitu; (1) konflik itu terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara; (2) salah satu pihak yang berkonflik adalah pemerintah yang sedang berkuasa; dan (3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan yang terus menerus.

Konflik etno-nasional yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat dianggap sebagai kekerasan komunal (*communal violence*) dan perang internal wilayah. Dalam kajian ini konflik "*intrastate*" dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbasis etnis, agama, dan ideologi. Kelompok-kelompok ini kira-kira berhubungan dengan apa yang disebut 'etno-nasionalis'. Konflik etnis telah menjadi fenomena yang meluas. Telah banyak contoh konflik-konflik '*intrastate*' sejak berakhirnya Perang Dunia II. Alasan memusatkan perhatian pada konflik etnis adalah sebagian besar konflik-konflik ini berkobar di negara-negara miskin. Akibatnya, konflik-konflik ini semakin memperparah kemiskinan negara-negara miskin tersebut dengan menghancurkan basis-basis ekonominya yang memang telah rapuh dan menimbulkan penderitaan tiada akhir terhadap generasi demi generasi rakyatnya. Selain itu ada bahaya bahwa beberapa konflik etno-politis meluas secara internasional yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia, dan karenanya metode-metode untuk menghindarkan atau menyelesaikannya secara damai merupakan suatu keniscayaan.

Dalam proses perencanaan wilayah konflik dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya. Pemecahan konflik dengan sasaran sumber daya manusianya sangat menguntungkan untuk dilaksanakan. Awalnya persoalan pengelolaan wilayah perbatasan negara hanya menjadi salah satu isu sensitive politik dan pertahanan, terutama dalam hal mempengaruhi kerjasama atau ketegangan bilateral antara dua negara yang memiliki wilayah berbatasan langsung. Seiring dengan perkembangan jaman, sensitifitas isu-isu pengelolaan wilayah

perbatasan negara juga menjadi problem multi lateral dan bahkan internasional, dimana kemajuan teknologi dan beroperasinya kepentingan negara dan korporasi yang lintas negara memunculkan beragam persoalan terkait perbatasan suatu negara atau aktivitas lintas batas negara.

Di masa lalu klaim, konflik dan kepentingan-kepentingan kedaulatan mulai dari wilayah perbatasan pada akhirnya diselesaikan melalui perang, yang berujung pada penundukan dan penguasaan wilayah negara serta berakibat juga pada kehancuran sistem politik, ekonomi dan sosial di suatu wilayah yang berhasil dikuasai. Adagium "*Civis Pacem Para Bellum*"(siapa yang menginginkan perdamaian harus bersiap untuk berperang) yang dipercaya sebagai justifikasi keluhuran perang telah membungkus beragam motif dibalik sebuah perang, termasuk persoalan-persoalan yang berawal dari wilayah perbatasan.

Sementara pada saat ini dibutuhkan suatu kemajuan dalam kearifan dan kemampuan mendeteksi ancaman, membangun strategi pengelolaan dan pertahanan serta mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan lebih elegan, konstitusional dan tunduk pada ketentuan-ketentuan internasional. Bagimanapun pilihan pengerahan kekuatan bersenjata pada saat-saat genting dalam sebuah negara modern yang demokratis, termasuk dalam mengatasi persoalan perbatasan (1) merupakan alternative terakhir (*last resort*); (2) diputuskan oleh otoritas politik sipil yang sah dan berwenang; (3) semata-mata untuk kepentingan pertahanan negara; (4) ditunjukkan untuk memulihkan kembali kondisi damai; (5) mematuhi prinsip non-diskriminasi; (6) proposional.

Kajian ini meneliti ruang lingkup teori konflik. Bagian yang penting sekali adalah pengantar teori-teori musuh (*enemy system*), kebutuhan dasar manusia (*human needs*) dan resolusi konflik untuk menjelaskan konflik. Pembahasan teori konflik ini penting untuk memahami sifat konflik itu sendiri. Untuk menemukan pemecahannya (solusi) terhadap masalah-masalah yang nampaknya tidak kunjung hilang dari berbagai belahan dunia, wilayah teoritis ini perlu dibahas secara mendalam. Pengembangan-pengembangan dalam bidang ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peneliti untuk lebih memahami dan membantu mencari pemecahannya.

1.2. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Konflik antar etnik, konflik horizontal berbasis etnik ini menjadi prioritas untuk dicari solusinya, karena kondisi masyarakat Indonesia yang plura.
- b. Konflik antar agama dan intra agama semakin menonjol karena kelompok-kelompok keagamaan yang sebelumnya menutup diri kini mulai berani meningkatkan jati diri mereka dan mengundang respons dari agama yang sudah ada serta memandang kelompok-kelompok ini sempalan dan sesat.
- c. Konflik antara penduduk setempat dan pendatang di dalam tahun-tahun belakangan akan diikuti oleh menguatnya pemisahan penggolongan penduduk setempat dan pendatang, termasuk para ekspatriat (orang asing) yang kini sedang mengelola sumber daya alam di Indonesia.
- d. Konflik antara negara dan masyarakat sipil, karena kepercayaan terhadap negara (pemerintah) selalu dipertanyakan.
- e. Konflik identitas masyarakat di perbatasan Indonesia dan negara lain: interaksi antara masyarakat kita yang hidup di perbatasan dengan masyarakat dari negara lain akan semakin penting diperhatikan, terlebih apabila tingkat kesejahteraan di luar Indonesia lebih baik, karena identitas kebangsaan bisa terganggu atau malahan luntur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Konflik Mikro.

Di antara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tatasosial eksternal. Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesa stimulus – respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung kearah agresi atau konflik. Mereka juga berusaha menyelidiki hubungan antara individu dan keberadaannya di lingkungannya. Mereka ingin memperhitungkan kemungkinan dengan cara berfikir induktif, variabel-variabel khusus mengenai konflik intrapersonal dan generalisasi, konflik intrapersonal (antar individu) dan internasional (antar bangsa). Di antara teori-teori mikro yang paling umum yang akan kita tinjau adalah: perilaku hewani (animal behavior), teori agresi bawaan atau instinktif, teori agresi frustrasi, teori pembelajaran sosial dan teori identitas sosial.

Di kalangan kaum behavioris para ahli biologi dan psikologi telah menggunakan studi-studi perilaku atau etologis hewan untuk menggambarkan kemungkinan adanya akibat wajar pada perilaku manusia. Manusia seringkali mengabaikan kenyataan bahwa kita adalah bagian dari dunia hewan (animal kingdom). Namun demikian kita harus hati-hati agar tidak mengambil kesimpulan langsung mengenai perilaku manusia dari perilaku hewan. Perilaku manusia dan hewan itu adalah fenomena yang kompleks meliputi faktor-faktor pendorong (*motivational*) seperti "kewilayahan (*territoriality*), dominasi, sexualitas, dan kelangsungan hidup (*survival*)". Ketika memakai metoda studi hewan variabel independen yang dikaji adalah agregasi. O'Connell merencanakan ruang lingkup (parameter) konflik manusia dengan menyatakan bahwa manusia terlibat dalam konflik '*predatory*' (pemangsaan) dan '*intraspecific*'. Walaupun kedengarannya sangat aneh tetapi bukannya tidak mungkin hewan melakukan banyak sekali jenis agregasi, tapi yang

membedakan manusia dari dunia hewan lainnya adalah motivasi (faktor pendorong) kita.

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berdasar hipotesa bahwa agregasi bukanlah sifat dasar bawaan (*innate*) atau naluri / instink (*instinctual*) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Hipotesa ini adalah pendirian/pendapatan, seseorang memperoleh sifat agresi dengan cara mempelajari dari rumah, sekolah, dan dari interaksinya dengan lingkungan pada umumnya. Interaksi dalam masyarakat itu membantu memusatkan dan memicu sifat agresi yang terpendam terhadap musuh. Konsep ini penting terutama ketika konflik itu bersifat etno-nasional atau sektarian.

Teori identitas Sosial (TIS) dikembangkan oleh ahli psikologi Henri Tajfel. Teori ini memberi wawasan tentang fenomena konflik. Yang membuat teori identitas ini berbeda adalah berdasar pada proses-proses psikologi normal yang beroperasi dalam semua keadaan, tidak hanya dalam kondisi-kondisi konflik antar kelompok. Teori ini telah membantu ahli psikologi sosial setidaknya mengenali bahwa perbedaan itulah yang menghasilkan bentuk-bentuk tindakan kelompok yang dapat dikenali. Dengan kata lain apa yang telah dilakukan Teori Identitas Sosial adalah menguraikan proses yang menempatkan individu dalam kelompok dan pada saat yang sama menempatkan kelompok dalam individu.

Teori mikro telah menambah dimensi penting pada pemahaman kita mengenai konflik. Teori ini menempatkan situasi yang kompleks ke dalam model-model yang bisa dikerjakan dan tegar terhadap analisis empiris. Teori-teori ini merupakan modal yang berguna dalam usaha kita menekankan obyektivitas pada situasi-situasi tertentu. Sosialisasi merupakan konsep yang penting begitu juga perbandingan-perbandingan kelompok, identitas diri dan kelompok yang positif dan pandangan ketidakabsahan oleh kelompok-kelompok minoritas. Setelah hal-hal ini difahami, perilaku agresif dapat dijelaskan, maka betapapun mendalamnya analisa empiris terhadap tataran mikro penelitian kita, masih tetap tidak bisa memperhitungkan semua variabel dan sifat konflik, terutama pada tataran sadar. Di sinilah teori makro berperan dalam analisis konflik manusia, untuk meliputi dunia sadar kita sekarang beralih pada teori konflik makro.

2.2. Teori Konflik Makro.

Teori makro memusatkan perhatian pada interaksi kelompok-kelompok, terutama pada tataran sadar. Para ahli teori politik awal dari Thucidydes dan Sun Tsu telah memilih satu unsur tertentu sebagai pusat perhatian kekuasaan. Memakai dan menjalankan kekuasaan adalah konsep utama teori konflik makro. Para ahli teori makro sependapat bahwa kekuasaan itu datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro atau teori klasik adalah bahwa akar konflik berasal dari persaingan kelompok pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber. Asumsi – asumsi ini beroperasi pada faktor-faktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material. Teori klasik menggunakan pengamatan-pengamatan fenomena kelompok pada suatu peristiwa untuk mempelajari masalah secara mendalam, dan menentukan pentingnya hubungan-hubungan banyak variabel daripada hanya menggunakan beberapa variabel untuk banyak kasus. Metodologi utama yang digunakan adalah pendekatan historis atau studi kasus.

Dalam teori makro terdapat seperangkat konsep yang dapat diambil dari studi konflik etnis. Di sinilah letak pentingnya pemahaman konflik etnonasional karena konsep yang sama dapat diterapkan pada konflik sektarian. Apakah konflik itu didefinisikan dalam istilah-istilah etnis atau sektarian, tidak banyak bedanya secara teoritis karena konsepsi-konsepsi untuk konflik etnis dan sektarian beroperasi dengan cara yang sama. Yang penting adalah kelompok-kelompok orang ini telah menggolongkan diri sebagai kelompok-kelompok yang berbeda dan mereka memandang satu sama lain sebagai luar kelompok atau musuh.

Dalam masyarakat yang sangat terpecah-pecah, persoalan etnis merasuk ke dalam banyak sekali masalah: rencana pembangunan, kontroversi pendidikan, masalah perdagangan, kebijakan pertanahan, kebijakan ekonomi, dan perpajakan. Secara khusus hal-hal yang ditempat lain akan ditempatkan ke dalam kategori administrasi rutin menduduki tempat utama dalam agenda politik masyarakat yang terpecah secara etnis.

Perpindahan atau migrasi dan penaklukan yang tidak sepenuhnya juga menimbulkan munculnya berbagai jenis keluhan sejarah yang tak kunjung

hilang. Sekelompok pribumi yang dijajah dan terpaksa membiarkan masuknya etnis asing untuk tujuan-tujuan ekonomi penjajah belakangan mungkin menganggap keberadaannya sebagai yang tidak sah. Ketika kekerasan etnis terjadi kelompok-kelompok yang tidak berakting biasanya tidak bertujuan terjadinya transformasi sosial, tetapi bertujuan mendekati otonomi kekuasaan dengan mengucilkan kelompok-kelompok etnis yang sejajar dari pembagian kekuasaan dan seringkali pengembalian dengan pengusiran atau pembasmian pada status quo ante (sebelum status quo) yang diperlakukan homogen secara etnis.

Meskipun agama dan kehilangan ekonomi mungkin merupakan faktor penunjang terhadap timbulnya konflik etnis, oposisi terhadap identitas nasional lah yang menentukan konflik. Inilah yang merupakan pedoman yang buruk bagi perilaku yang diilhami oleh etnonasional. Salah satu konsep kunci dan berlawanan untuk perilaku etnonasional adalah tidak digerakan oleh elit, sebagaimana fenomena politik lainnya, tetapi hal ini digerakan oleh massa. Jika demikian halnya maka perilaku etnonasional itu mempunyai akibat-akibat penting untuk mencarikan jalan pemecahannya. Apabila kerjasama elit bukan kunci pemecahan masalah, maka kunci itu terletak pada hal yang lain. Tetapi hal ini belum ditemukan, bila telah ditemukan maka akan diterapkan pada masyarakat yang terpecah-pecah.

Oleh karena teori mikro dan makro sampai saat ini tidak cukup untuk menjelaskan konflik dalam berbagai komunitas, maka pencarian paradigma baru harus dimulai dengan fusi atau sintesa teori mikro dan makro. Usaha untuk melakukan hal ini terwujud dengan lahirnya Teori Sistem Musuh (*Enemy System Theory/EST*), Teori Kebutuhan Manusia (*Human Needs Theory/HNT*), dan Teori Resolusi Konflik (*Conflict Resolution Theory/CRT*).

Teori Sistem Musuh dikembangkan untuk membantu menjelaskan konflik yang berkepanjangan dan digunakan untuk menjelaskan Perang Dingin pada awal tahun 1990an sebelum runtuhnya Uni Soviet. Teori ini merupakan fusi (gabungan) psikologi pertumbuhan dan teori hubungan antar bangsa. Teori ini mengetengahkan beberapa konseptualisasi yang membantu menciptakan model konflik yang canggih. Teori ini telah digunakan untuk menjelaskan

terorisme secara umum, tetapi belum diadopsi secara luas untuk menjelaskan totalitas konflik.

Teori Kebutuhan Manusia dikembangkan pada tahun 1970 an dan 1980 an sebagai teori generik atau holistik mengenai perilaku hewan. Teori ini berdasarkan hipotesa bahwa manusi mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memelihara masyarakat yang stabil. Kita yakin bahwa keterlibatan manusia dalam situasi konflik mendorongnya berjuang di dalam lingkungan kelembagaannya pada setiap tataran sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primordial dan universal. Kebutuhan seperti keamanan, identitas, pengakuan, dan pembangunan. Mereka terus berusaha menguasai lingkungannya yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini. Perjuangan ini tidak bisa dikekang, perjuangan ini sifatnya primordial.

Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan primordial ini secara teoritis berhubungan dengan teori Frustrasi-Agresi yang berdasarkan pada hipotesa stimulus-response. Rasa frustrasi tidak bisa memenuhi kebutuhan primordial ini mengarah pada agresi dan akhirnya konflik. Sekarang kita tahu bahwa ada nilai-nilai atau kebutuhan manusia universal yang mendasar yang harus dipenuhi jika ingin menciptakan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat yang multi etnik ketidakstabilan dan konflik tidak bisa dihindari, kecuali jika kebutuhan identitasnya terpenuhi dan dalam setiap sistem sosialnya ada keadilan yang merata, rasa penguasaan serta kemungkinan memperoleh semua kebutuhan pembangunan masyarakat manusia lainnya.

Sedangkan Teori Resolusi konflik artinya teori untuk menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berbeda dengan sekedar manajemen atau 'settlemen' yang mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

- a. Membahas aliran pemikiran teori konflik untuk memberikan batasan ruang lingkup dan ragam konflik.
- b. Membangun model penyelesaian konflik sesuai dengan wilayah terjadinya.
- c. Inventarisasi data statistik berkenaan dengan analisis biogeofisik, analisis kelembagaan, analisis ekonomi, analisis sosialbudaya, analisis lingkungan, serta analisis lokasi pada tiap-tiap wilayah terjadinya konflik.
- d. Membangun sistem pendukung pengambilan keputusan atau *Decision Support Systems (DSS)* yang memacu percepatan penyelesaian konflik.

3.2. Manfaat Penelitian.

Dalam proses perencanaan wilayah konflik dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya. Pemecahan konflik dengan sasaran sumber daya manusianya sangat menguntungkan untuk dilaksanakan. Pada awalnya akar permasalahan konflik sosial hanyalah masalah kesenjangan sosial yang semakin melebar dan ketidakadilan terutama terkait dengan marginalisasi politik antara penduduk asli dengan pendatang. Sedangkan isu etnis dan agama sengaja dihembuskan oleh provokator, karena memang kedua isu ini masih sangat sensitive dan mengundang emosi. Ditambah lagi tingkat intelektualitas kebanyakan masyarakat masih relatif rendah sehingga masih sangat rawan untuk terprovokasi berbagai isu. Di pihak lain pemerintah setempat tidak tanggap dan tidak aspiratif terhadap kondisi riil masyarakat dan pergesekan-pergesekan sosial yang kebanyakan memang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat/sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat setempat. Elit-elit di daerah yang tidak lain adalah wakil rakyat dan pemegang mandat rakyat hanya berpikir bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan, bukan untuk apa dan untuk siapa dia berkuasa. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kasus konflik sosial ini,

karena kecenderungan yang tampak saat ini adalah meningkatnya konflik dan potensi konflik komunal di banyak daerah, etnonasionalisme bangkit dan mengalahkan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADA). Isu putra daerah dijadikan calon pemimpin politik tanpa mau memperhatikan soal kompetensi dan kapabilitas. Apalagi soal wawasan pengetahuan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Padahal yang dibutuhkan daerah di Indonesia untuk maju saat ini adalah orang-orang terbaiklah yang dipercaya menjadi pemimpin. Mereka yang mempunyai kemampuan dan juga komitmen untuk memajukan daerah dan juga masyarakat di daerah itu, tidak peduli dari mana asalnya sepanjang dia orang Indonesia dan mempunyai konsep pembangunan daerah yang jelas, maka dialah yang seharusnya diberi kepercayaan untuk memimpin daerah tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah membuat kebijakan yang sesuai dengan daerah konflik, sehingga aturan yang diterapkan tidak menimbulkan konflik yang baru.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Data dan Sumber Data. Data yang dikumpulkan meliputi data letak dan kondisi geografis, demografi, sosial budaya, potensi SDA, aktifitas ekonomi, masalah hankam dan data pendukung lainnya. Di samping itu akan digali persepsi dari penduduk dan pejabat daerah konflik terkait dengan keinginan serta harapannya akan penyelesaian konflik yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah.

4.2. Pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan, yang diawali dengan identifikasi dan pengumpulan data, identifikasi potensi dan permasalahan, penyusunan kerangka model penyelesaian konflik di daerah konflik. Selanjutnya hasil tersebut akan dikemas dalam bentuk *policy paper* yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Daerah yang terjadi konflik. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Pengumpulan data. Pada tahap ini, akan dilakukan proses pengumpulan data. Data-data yang akan dikumpulkan sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan. Terdapat 2 sumber data yang akan digunakan, yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, BPS, TNI, Polri dan sumber-sumber lainnya. Data primer diperoleh melalui survai, wawancara mendalam pada tokoh masyarakat, pejabat pemerintah terkait, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) dan observasi ke lapangan.
2. Identifikasi potensi dan permasalahan. Pada tahap ini dilakukan penggalian permasalahan utama dan potensi yang dimiliki Provinsi. Beberapa potensi yang akan digali diantaranya sosial budaya, SDA, ekonomi, kelembagaan dan pertahanan.
3. Pada tahap akhir ini menyusun atau membangun model penyelesaian konflik yang dapat dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian konflik dan menyusun strategi pengembangan sistem pertahanan dan pengamanan wilayah sekaligus sebagai bentuk penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Memahami Konflik Sosial.

Konflik Sosial. Kini adalah waktu yang tepat bagi kita di Indonesia untuk mengidentifikasi, mengetahui dan memahami konflik-konflik yang potensiil akan terjadi maupun sudah terjadi di tanah air. Apabila pemahaman itu telah kita capai, maka resolusi atas konflik-konflik tersebut bisa dilakukan. Untuk kepentingan nasional, kita memerlukan analisa pada tingkat makro tentang asal-usul dan dinamika konflik sosial. Sedangkan analisa tingkat mikro merupakan sumber materi seperti arena dari kasus-kasus konflik yang particular, dari sinilah pemahaman makro diperoleh agar kita mampu merencanakan pemecahan (resolusi) konflik sosial, untuk itu kita terlebih dahulu harus memahami dengan baik asal-usul dan dinamika konflik-konflik yang terjadi.

Pemahaman tentang Asal-usul. Perhatian para ahli terhadap isyu konflik meningkat pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 ini. Interaksi antar manusia dan antar masyarakat secara lokal, nasional, dan global telah meningkat. Mereka mengemukakan sejumlah proposisi yang kita uraikan secara singkat di bawah ini.

1. Konflik adalah unsur mendasar pada semua hewan sosial, termasuk manusia. Proposisi ini berbasis biologi yang dikembangkan oleh ahli primat (etologi). Dalam proposisi ini dikemukakan bahwa instink untuk melakukan konflik dengan individu lain selalu ada secara alamiah. Manusia, berbeda dari hewan sosial lain, tidak memiliki senjata alamiah melainkan mengembangkan kecerdasan superior untuk mengalahkan lawannya. Konrad Lorenz adalah salah satu tokoh terpenting dari teori ini.
2. Konflik sosial bersumber dari ciri dasar suatu masyarakat dan bagaimana ciri dasar itu distrukturkan. Proposisi ini dikenal juga sebagai teori tekanan (*coercion theories*). Karl Marx dianggap sebagai salah satu tokohnya, yang memandang masyarakat kapitalis sebagai struktur yang ketat berlapis-lapis yang di dalamnya koherensi dipelihara melalui *coercion* (tekanan) terhadap kelompok atau kelas tertentu oleh kelompok atau kelas yang lain. Konflik bersumber dari pertentangan

kepentingan yang berorientasi kelas yang tak terelakkan sudah ada secara laten, dan suatu saat akhirnya akan mewujud.

3. Konflik adalah proses disfungsional dalam sistem sosial. Proposisi ini tercermin dalam teori konsensus atau integrasi. Talcott Parsons dan Neils Smelser adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam aliran teori konflik ini. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang koheren melalui konsensus normative. Koherensi itu berakar pada legitimasi sistem sosial dan status dan peranan di dalamnya sebagaimana dipersepsikan oleh para anggotanya.
4. Konflik terjadi karena fungsional bagi sistem sosial. Konflik tidak secara inheren patologis atau tidak harus disfungsional. Lewis Coser termasuk dalam kategori teori ini. Ia menggambarkan melalui proposisi-proposisi yang dapat diuji bagaimana masyarakat dapat diperkuat secara internal, hubungan-hubungan antara masyarakat-masyarakat dipertahankan dan didorong, dan patologis sosial direduksi –semua melalui konflik. Fungsi konflik sangat tergantung pada satuan referensi. Konflik dengan masyarakat lain dapat membentuk koherensi dan kekuatan internal bagi suatu masyarakat tersebut dan oleh karena itu bersifat fungsional bagi masyarakat tersebut
5. Konflik adalah konsekuensi komunikasi yang buruk, kesalahan persepsi, salah perhitungan, sosialisasi, dan proses-proses tak disadari lainnya. Para peneliti konflik perilaku ini memusatkan perhatian pada para aktor yang berkonflik; gaya pengambilan keputusan para pemimpin, variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan, persepsi dan komunikasi antar pihak-pihak yang berkonflik, nilai dan sikap yang mempengaruhi perilaku konflik, dan variabel kepribadian yang menghendaki damai atau konflik.
6. Konflik adalah proses alamiah yang umum ditemukan pada semua masyarakat, dengan dinamika yang dapat diprediksi dan memungkinkan bagi regulasi konstruktif. Setiap situasi konflik dapat dianalisa untuk kebutuhan intervensi yang konstruktif. Pendekatan analisa mikro ini dibangun berdasarkan konflik berbasis komunitas.

Memahami Dinamika. Memahami proses mikro dan makro dalam hal konflik sangat diperlukan bagi regulasi konflik. Ada beberapa proposisi yang perlu kita ketahui berkaitan dengan proses konflik mikro dan makro itu.

1. Konflik sosial adalah proses dialektika di mana sintesa terjadi dan melalui proses sintesa itu masyarakat ditransformasi dari suatu keadaan ke keadaan lain. Diadopsi dari konsep Hegel tentang dialektika dan diterapkan pada realitas sejarah. Marx memandang konflik kelas berkembang menurut fase-fase, dan setiap fase bersumber dari fase sebelumnya dan akhirnya menuju kepada revolusi sepenuhnya. Hal ini akan membentuk suatu masyarakat yang pada dasarnya bebas konflik karena tidak akan ada lagi kepentingan kelas. Bondurant (yang dipengaruhi Gandhi) yang memperbaiki teori Marx menyatakan bahwa konflik dalam masyarakat adalah proses mencari kebenaran yang tak berujung. Konflik tidak akan pernah hilang tetapi selalu merupakan sumber pencarian kebenaran yang tak habis-habisnya. Namun, kebenaran absolut itu tak pernah ada (berbeda dari Marx yang meyakini adanya kebenaran absolute) sehingga konflik terus akan ada.
2. Konflik sosial pada dasarnya siklikal dalam perkembangannya dan bergerak melalui suatu rangkaian fase-fase yang dapat diprediksi. Kriesberg adalah salah satu tokoh yang mengembangkan proposisi ini. Mode analisisnya adalah suatu siklus yang menelusuri terbentuknya konflik obyektif dan mengikutinya melalui fase-fase kesadaran, eskalasi, deskalasi, dan terminasi hingga hasilnya yang mengandung atau tidak mengandung potensi terjadinya pengulangan konflik.
3. Konflik mengalami kemajuan ketika kelompok yang tertekan menjadi semakin sadar akan kepentingan konflik dan kemudian bergerak untuk mengubah situasi. Tahap-tahap dari proses ini adalah : (1) kesadaran yang rendah – misalnya, kasus perbudakan ketika budak tahu kedudukan mereka tetapi tetap pasif tak peduli; (2) kesadaran yang lebih tinggi mengenai landasan kepentingan konflik—melalui pendidikan; (3) konfrontasi pihak yang menekan dan yang ditekan – baik secara halus maupun kekerasan; (4) konsiliasi dan tawar-menawar; dan (5) restrukturisasi hubungan-hubungan yang sebelumnya tidak damai.

4. Konflik pada dasarnya adalah dinamika interaksi dua atau lebih pihak yang bergerak dalam suatu lapangan hingga posisi optimum (dalam perangkat urutan peringkat posisi), yang dipersepsikan ditempati atau dikuasai oleh pihak lawan. Kenneth Boulding berpendapat bahwa proses konflik berpusat pada perilaku setiap pihak yang berkonflik.
5. Setiap situasi konflik mengandung unsur-unsur dan dinamika yang dapat diprediksi seperti proses eskalasi, penghambatan dan fasilitasi, dan perubahan kepemimpinan.

Konflik dan Kekerasan. Hal lain yang penting kita bicarakan dalam analisa konflik adalah hubungan antara konflik dan kekerasan – kedua konsep ini terlalu sering dianggap orang identik atau melekat satu sama lain. Sebenarnya, banyak konflik terjadi tanpa diakhiri dengan kekerasan, atau sebaliknya banyak kekerasan yang tidak diawali oleh konflik.

Sebagian analis konflik tidak begitu tertarik dengan hubungan konflik dan kekerasan. Minat mereka terhadap konflik terutama dimotivasi oleh keinginan mereka untuk meminimalisasi kekerasan. Ada beberapa proposisi yang diajukan dalam konteks hubungan antara konflik dan kekerasan:

1. Ada dua jenis kekerasan yang memerlukan perhatian para peneliti tentang perdamaian – yakni kekerasan perilaku dan kekerasan struktural. Kekerasan perilaku sebagaimana umumnya yang kita pikirkan mengakibatkan kerusakan jasmani dan benda-benda. Kekerasan dalam kategori ini mencakupi pembunuhan, brutalitas, penyerangan fisik di jalan raya, bunuh diri, vandalism, dan sebagainya. Konsep kekerasan struktural (antara lain dikembangkan John Galtung) menghubungkan secara langsung kekerasan perilaku dengan ciri-ciri dasar stratifikasi nasional dan internasional dan hubungan dominan/ketergantungan yang tersimpan di dalamnya.
2. Simetri dalam konflik, yang lain menjadi setara, mengurangi kekerasan yang dihasilkan dalam proses perkembangan konflik. Sebagai contoh, faktor penggentar senjata nuklir yang digunakan oleh dua pihak yang berkonflik membuktikan keduanya tidak akan menggunakan senjata itu. Sebaliknya asimetrik dalam konflik akan melahirkan strategi-strategi tertentu yang menimbulkan kekerasan. Contohnya adalah konflik antara

Israel-Palestina yang asimetri menimbulkan kekerasan satu sama lain. Terorisme misalnya, adalah konsekuensi dari konflik yang asimetri ini.

3. Perdamaian yang stabil adalah proses perkembangan, bukan semata-mata tidak adanya kekerasan yang nyata. Kerap kali tidak adanya konflik terbuka dalam hubungan sosial menjadi tanda hadirnya opresi dan stagnasi, suatu keadaan bukan-damai. Perdamaian adalah bagian dari proses peredaman atas kekerasan dan pengrusakan, dan juga memerlukan transformasi institusi sosial dan politik yang melakukan kekerasan terhadap individu maupun kelompok.
4. Keteraturan di dunia tidak hanya tergantung pada cara-cara non-kekerasan yang dilancarkan untuk menyelesaikan persengketaan tetapi juga pada pemecahan masalah global secara kolektif. Keteraturan dunia menuntut kita untuk mengkonseptualisasi masa depan alternatif berbasis *multikultural*, dan kearah sanalah para pemimpin dunia harus bergerak. Sebagai contoh, dapatkah masalah kemiskinan global dipecahkan hanya dari sudut kekerasan atau penambahan penduduk berlebihan, tanpa menyentuh pengrusakan lingkungan ?
5. Kekerasan dan perilaku non-kekerasan untuk sebagian besar adalah respon yang dipelajari. Penelitian sosial menunjukkan bahwa kekerasan adalah respon yang dipelajari dari frustrasi atau konflik, bahwa masyarakat (misalnya, media massa, organisasi militer, sosialisasi geng, bahan bacaan) mengajar orang bagaimana berlaku kekerasan dan mendorong orang melakukannya.

5.2. Kasus Konflik Poso

Wilayah dan geografi. Poso adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, sekaligus ibu kota kabupaten ini. Secara geografis Poso berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara di Utara, Propinsi Sulawesi Selatan di Selatan, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali di Timur, dan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong di Barat. Luas wilayah kira-kira 8,712 km persegi (Sulawesi Tengah dalam Angka, 2007). Secara administratif daerah ini terbagi menjadi 13 kecamatan, yang terdiri dari 29 kelurahan, dan 211 desa.

Daerah ini memiliki kekayaan alam, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang masih potensiil. Poso memiliki hutan yang mengandung berjenis-jenis kayu yang bernilai ekonomi tinggi seperti eboni, meranti, besi, agatis, rotan, dan damar. Selain itu hidup berjenis-jenis fauna seperti anoa, babi rusa, dan burung maleo yang terkenal. Poso juga memiliki potensi kekayaan alam selain tambang mineral yang tersebar di kawasan pegunungan, yakni baru ditemukannya 32 titik sumber minyak baru di sekitar Teluk Tomini, Pesisir Poso.

Penduduk : Jumlah dan komposisi. Catatan tahun 2007, penduduk Poso berjumlah 2.679.654 jiwa. Komposisi secara etnik penduduk Poso terdiri dari etnik-etnik Pamona Bare'e, Kaili, Mori, Gorontalo, Bugis, dan Bali. Selain itu ada etnik-etnik lain yang kecil jumlahnya (Sulawesi Tengah dalam Angka 2006). Penduduk Poso relatif seimbang dalam hal penganut agama. Sekitar 45 persen penduduk beragama Islam, sekitar 35 persen beragama Kristen, sedangkan sisanya penganut Buddha, Hindu, dan lainnya.

Penduduk pada umumnya bertani. Mereka menanam padi, tanaman hortikultura, dan palawija. Selain itu penduduk juga menghasilkan komoditas perkebunan seperti kakao, kopi (arabika dan robusta), kelapa, lada, cengkeh, dan jambu mete. Pada tahun-tahun terakhir banyak penduduk menanam vanili karena harganya cukup baik. Hasil pertanian ini berdampak terhadap perdagangan. Agar perdagangan lancar, infrastruktur berupa jalan dalam kondisi baik, yang menghubungkan antar daerah sangat dibutuhkan. Untuk mendukung kelangsungan hubungan antar daerah, di kabupaten ini juga terdapat Bandara Kasinguncu dan Pelabuhan Poso.

Masyarakat Poso memiliki sejarah sosial dan kebudayaan yang panjang. Sejatinya masyarakat Poso menggunakan bahasa Bare'e. Masyarakat mengikat hubungan sosial dengan nilai *sintuwu maroso*, yang artinya persatuan yang kuat. Namun, nilai ini terkoyak ketika pecah konflik sosial pada akhir 1998 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Asal-Usul Konflik. Pada akhir 1998, Kabupaten Poso menorehkan sejarah yang pahit yang tak terbayangkan sebelumnya. Suatu negeri yang tadinya aman bagi semua orang mendadak menjadi ajang pertarungan berdarah, ratusan orang tewas terbunuh dalam perkelahian massal bersenjata antar dua pihak yang

menganggap pihaknya benar, pihak lain salah. Nilai *sintuwu maroso* seolah lenyap ditelan bumi, digantikan dengan tindak kekerasan semena-mena yang jauh dari kemanusiaan. Kemana semua nilai dan tradisi yang sudah dijalankan berabad-abad? Apakah pencetus konflik demikian kuat dan menentukan sehingga ledakan konflik yang terjadi begitu besar intensitas, akibat, dan lamanya.

Di bawah ini kita mengulas secara kategoris peristiwa konflik tersebut dengan harapan bahwa pemahaman kita tentang konflik menjadi lebih komprehensif, dan atas dasar itu suatu upaya resolusi konflik yang relevan dapat dikembangkan.

1. Isu, desas-desus, pencitraan. Konflik Poso sebenarnya bermula dari peristiwa percekocokan dua individu saja, yang kebetulan keduanya berbeda agama. Percekocokan yang kemudian menjadi perkelahian ini menjadi buah bibir orang sedesa, sekelurahan, sekecamatan, dan seterusnya. Dapat dibayangkan dahsyatnya pencitraan yang dikembangkan sehingga perkelahian dua individu itu menjadi persoalan besar nasional hingga internasional pada masa-masa sesudahnya. Dikatakan pencitraan karena asal-usul konflik tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkannya.

Waktunya adalah antara perayaan Natal dan permulaan bulan Puasa, Desember 1998. Pemicunya adalah perkelahian antara dua pemuda, Roy yang beragama Kristen dengan Nas yang beragama Islam di desa Sayo. Entah kenapa beredar desas-desus di mesjid Sayo bahwa Nas yang muslim tewas terpotong-potong di pinggir desa. Pada tanggal 24 Desember 1998, serombongan pemuda muslim mendatangi rumah Roy di kelurahan Kasintuwu dan merusak rumah tersebut. Roy kebetulan tidak ada di tempat.

Hari berikutnya, 25 Desember 1998, massa muslim berkonsentrasi di jalanraya kelurahan Sayo untuk menghadang umat Kristen yang sedang menuju gereja Peniel Poso untuk melaksanakan ibadah Natal. Nyaris terjadi perkelahian massal kedua umat tetapi bisa dicegah oleh petugas kepolisian. Malam harinya, beredar desas-desus bahwa Roy dan kawan-kawannya mabuk-mabuk sebelum berkelahi dengan Nas. Pada tanggal 26 Desember 1998 sekelompok pemuda muslim menyerang kios-kios yang diduga menjual minuman keras, dan

membakarnya. Keadaan ini membuat umat Kristen akhirnya melakukan perlawanan. Perkelahian massal pun tidak dapat dihindari. Saling serang berlangsung hingga fajar keesokan harinya.

Entah dari mana datangnya, pada malam 27 Desember 1998, muncul desas-desus baru bahwa Imam Masjid Sayo tewas dibantai pemuda Kristen. Meski hal ini ternyata hanya desas-desus, ketegangan kedua pihak sudah mencapai kulminasi dan tidak dapat lagi dikendalikan aparat keamanan. Muspida berusaha mengendalikan situasi itu tapi hanya berhasil sebentar. Perkelahian massal makin meningkat, terjadi bakar-membakar rumah dan memusnahkan sedikitnya 80 rumah dari kedua belah pihak.

Uraian peristiwa di atas menunjukkan bahwa persoalan pribadi antara dua individu meluas menjadi massal karena isu, desas-desus, dan pencitraan. Ada jurang komunikasi antara fakta dengan hasil penafsiran akhir orang-orang yang menerimanya. Pencitraan adalah penafsiran dalam keterbatasan manusia secara bertingkat, dan ketidakmampuan manusia untuk memverifikasi realitas yang sesungguhnya, sehingga pada tingkat terakhir terdapat jarak yang jauh antara fakta pertama dengan realitas akhir. Perkelahian massal seringkali terjadi karena jurang-jurang komunikasi yang tak mampu dijabatani ini.

2. Momentum politik lokal. Mereda di bawah pengendalian pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat, konflik ibarat api dalam sekam. Hanya bertahan kira-kira 3 bulan Poso memanas lagi. Pada bulan April 1999 Poso memasuki babak baru, yaitu pemilihan kepala daerah. Suhu politik meningkat, terutama karena pemilihan kepala daerah baru dikaitkan dengan peristiwa akhir 1998, pengalaman pahit antara umat Islam dan umat Kristen. Momentum pergantian kepala daerah melibatkan sentimen agama.

Pada tanggal 30 Oktober 1999, Muin Pasadan terpilih sebagai bupati. Tak lamakemudian beredar selebaran yang berisikan sejumlah nama yang terlibat dalam konflik Poso pada tahun 1998. Sebagian besar nama adalah pejabat sipil yang umumnya Kristen. Agfar Patanga yang terbukti menyebarkan selebaran provokatif itu ditangkap petugas dan

dijatuhi hukuman 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Poso. Selain itu, Herman Parimo, tokoh Kristen yang dianggap sebagai salah satu otak konflik Poso dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dia kemudian meninggal di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar, ketika berobat di sana.

Penduduk Poso semakin terpolarisasi antara umat Islam dan Kristen, dan keadaan ini semakin menajam ketika penduduk kembali melihat proporsi kekuatan dalam pemerintahan daerah. Kemenangan Muin Pusadan memicu kembali konflik karena pihak penganut Kristen tidak dapat menerima kemenangan tokoh ini. Pada tanggal 16 April 2000 konflik kembali pecah, aksi saling serang dan bakar terjadi lagi. Pada tanggal 27 April 2000, kelompok muslim melakukan penyerangan dan pembakaran di Kelurahan Lombogia. Serangan balasan dari pihak kelompok Kristen terjadi pada 20 Mei 2000 ke Pesantren Wali Songo di desa Sintuwulemba. Sekitar 100 warga muslim tewas pada kejadian itu. Peristiwa ini yang kemudian menyebabkan Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva dijatuhi hukuman mati, dan menjalani eksekusi tanggal 22 September 2006.

Ketika konflik sudah bersifat kolektif maka isu individual rentan menjadi isu politik karena kekuatan kedua belah pihak menjadi relevan. Orang tidak lagi mempersoalkan asal-usul konflik yang individual itu melainkan kedua belah pihak menyusun kekuatan agar pihak lawan tidak dapat mengalahkan. Rekrutmen dilakukan dengan mengangkat isu-isu sensitif seperti bahaya yang timbul apabila pihak lawan menang dan duduk di puncak pemerintahan. Umat Kristen ditengarai terancam apabila umat Islam memegang tampuk pemerintahan daerah. Isyu seperti ini biasanya ampuh untuk memperkuat solidaritas internal setiap umat yang bertikai.

3. Pengorganisasian kekerasan. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa konflik tidak harus berujung pada kekerasan. Demikian pula sebaliknya, kekerasan tidak harus diawali oleh konflik. Ketika konflik memuncak menjadi kekerasan, pihak-pihak yang terlibat akan memaksimalkan pengorganisasian para anggota kelompok yang bersangkutan baik dalam hal kesetiaan kepada kelompok maupun

keaktifan untuk merekrut dan menuntut komitmen anggota baru. Dalam kasus Poso kita melihat pengorganisasian ini dalam bentuk laskar-laskar perjuangan yang berada di bawah kedua pihak yang berkonflik. Pengorganisasian laskar-laskar ini juga terjadi dalam ruang lingkup yang lebih luas, yakni pada tingkat propinsi dan nasional. Pada masa antara tahun 2000-2005, gelombang demi gelombang orang-orang yang menamakan diri laskar tertentu menyatakan tekad untuk datang ke Poso untuk membela salah satu pihak yang bertikai. Data menunjukkan bahwa sebagian dari mereka benar-benar sudah datang di Poso dan terlibat dalam konflik dan kekerasan langsung.

Pengorganisasian kekerasan yang diperluas itu semakin memperumit kasus konflik Poso. Berbagai pihak yang terkait dalam konflik, pendukung setiap pihak, aparat keamanan yakni Polri dan TNI, aparat pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain terlibat seperti benang kusut dan sukar sekali mengetahui yang benar atau yang salah.

4. Senjata tradisional, rakitan, dan organic. Ketika konflik telah berkembang menjadi kekerasan urusan senjata menjadi relevan. Alasan awal orang melengkapi diri dengan senjata adalah untuk membela diri dari serangan orang lain, bukan untuk menyerang. Mulai dari individu, kelompok, masyarakat, hingga negara alasan awal ini berlaku. Kekhawatiran tidak mampu mempertahankan diri atau kolektifnya, orang mulai mempersenjatai diri. Ketika serangan dan kekerasan benar-benar terjadi senjata berlaku untuk kedua fungsinya, yaitu mempertahankan diri sekaligus menyerang lawan. Dalam konteks ini senjata yang pada awalnya hanya pelengkap, kini menjadi utama. Keberhasilan mengalahkan lawan sangat tergantung pada kemampuan senjata.

Dalam konflik Poso, warga masyarakat yang terlibat konflik pada mulanya menggunakan senjata tradisional seadanya. Mereka mempersenjatai diri dengan parang, badik, lembing, panah, tombak, dan lain-lain. Setiap anggota keluarga mempersiapkan senjata itu apa adanya di rumah masing-masing untuk berjaga-jaga setiap saat bilamana terjadi serangan. Perempuan dan anak-anak ditempatkan di tempat yang aman dalam rumah sedangkan kaum lelaki dewasa

bersiaga di luar rumah siang dan malam. Keadaan begitu mencekam, anak-anak tidak dapat bersekolah secara normal. Penyérangan dan pembakaran yang sudah terjadi menimbulkan trauma hebat di kalangan penduduk.

Desas-desus yang beredar bahwa pihak lawan menggunakan persenjataan yang lebih canggih mendorong pihak yang berkonflik meningkatkan kemampuan persenjataan mereka. Beberapa orang mungkin memiliki pengetahuan meramu bahan-bahan kimia tertentu untuk membuat peledak rakitan. Pada waktu selanjutnya peledak atau bom rakitan ini banyak digunakan selain berjenis senjata tradisional yang sudah ada. Pada tahun 2002 hingga 2005 terjadi setidaknya 10 kali ledakan bom yang merenggut puluhan nyawa. Sebagai contoh, pada tanggal 28 Mei 2002 bom meledak di Pasar Sentral Poso dan 5 Juni 2002 bom meledak di sebuah bus umum Antariksa rute Palu-Tentena yang menewaskan beberapa orang dan melukai sejumlah orang. Peristiwa ini meningkatkan saling curiga di kalangan penduduk.

Tak jelas darimana datangnya, kedua belah pihak yang bertikai mendadak sudah menyangdang senjata organik militer seperti pistol dan senapan. Dengan mudah pihak luar dari yang berkonflik menduga bahwa senjata itu berasal dari dan sekaligus menjadi tanda terlibatnya tentara dalam konflik Poso. Dari sinilah mulai tuduhan bahwa tentara terlibat, dan bahkan dituduh merekayasa konflik Poso untuk kepentingan politik tertentu. Meski TNI secara institusional berkali-kali menyatakan bahwa TNI tidak terlibat, namun adanya oknum-oknum tertentu yang terlibat jual-beli senjata maka konflik menjadi semakin rumit.

5. Penduduk lokal dan pendatang. Poso dihuni oleh orang lokal ("asli") dan pendatang. Sukubangsa Toraja adalah penduduk asli Sulawesi Tengah, yang terdiri dari etnik Toraja Koro, etnik Toraja Palu, dan etnik Toraja Sa'dan. Para pendatang yang datang ke Sulawesi tengah adalah orang-orang dari etnik Bugis, Gorontalo, Minahasa, Jawa, Bali, etnik dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Tionghoa, dan Arab. Etnik-etnik pendatang ini memasuki Poso umumnya melalui migrasi spontan maupun transmigrasi yang dijalankan pemerintah.

Arus transmigrasi intensif terjadi sejak 1970an dan 1980an, khususnya setelah dibukanya prasarana angkutan darat Trans-Sulawesi. Kedatangan para pendatang menyebabkan terjadinya peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Para pendatang kemudian mengembangkan tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kakao dan kopra. Pengembangan tanaman itu lantas menghasilkan peningkatan kesejahteraan pemiliknya. Meski penduduk asli mengikuti pula pola tanam itu namun pemasaran hasil-hasil perkebunan dikuasai oleh para pendatang. Karena kondisi sosialekonomi penduduk asli tidak sebaik pendatang, penduduk asli kurang bisa bersaing dengan para pendatang.

Penduduk asli Poso yang beragama Kristen awalnya banyak tinggal di daerah tengah, namun lama kelamaan mereka terjepit oleh penduduk pendatang yang terutama beragama Islam. Semakin lama jumlah pendatang yang muslim semakin seimbang dengan penduduk Kristen setempat, khususnya di Poso Pesisir dan Pamona Selatan. Kaum pendatang semakin bertambah jumlahnya bukan hanya karena beranak-pinak tetapi juga karena keberhasilan mereka mengundang migran-migran baru untuk mengadu untung. Sebagian besar migran baru adalah kerabat, orang sesama etnik, teman, orang sekampung, dan sebagian kecil migran yang datang sendiri. Kondisi ini mengakibatkan kuatnya ikatan kerabat dan kedaerahan di kalangan para migran. Hal ini pula yang menyebabkan konflik individu cepat sekali berubah menjadi konflik kolektif.

Kaum pendatang, seperti juga ditemukan di banyak daerah lain, adalah kategori yang dianggap lebih berhasil dalam kehidupan sosialekonomi. Kemajuan hidup yang mereka capai membuat mereka lambat laun mendominasi perekonomian lokal dan secara alamiah menggeser kedudukan penduduk asli ke perifer. Meski tidak ada kajian mendalam mengenai perbandingan tingkat kesejahteraan ini, fakta kasat mata menunjukkan bahwa kepemilikan kaum pendatang lebih baik daripada penduduk asli. Sebagian besar kepemilikan toko-toko di pasar, pegawai tingkat menengah ke atas di pemerintahan maupun swasta, pemilik perusahaan berbagai jenis, penguasaan sektor pertanian dan

perkebunan, dan lain-lain berada di tangan kaum pendatang. Penduduk asli nampaknya sukar bersaing dengan kecepatan pendatang dalam mencapai hasil yang tinggi.

6. Kesenjangan sosial-ekonomi, marjinalisasi, dan prasangka. Terkait dengan fakta yang diuraikan pada (6) di atas adalah konteks hubungan antar etnik yang rawan. Kedatangan gelombang demi gelombang pendatang dengan motivasi dan semangat survival yang lebih tinggi perlahan tapi pasti telah menggeser kedudukan penduduk setempat ("asli") ke marjin sistem sosial-ekonomi lokal. Sebenarnya proses kesenjangan dan marjinalisasi penduduk lokal ini juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Kasus orang Betawi di DKI Jakarta, orang Dayak di Kalimantan, orang Kubu di Jambi, orang Marind Anim di Papua, dan banyak lagi, adalah contoh-contoh proses marjinalisasi.

Masalah marjinalisasi ini belum mengemukakan pada masa Orde Baru dulu karena perbedaan dan potensi konflik dikontrol dan ditutup oleh kebijakan sentralistis negara. Pada masa itu isu Sukubangsa, Agama, dan Ras (SARA) adalah isu yang sensitif dan tidak boleh diperdebatkan karena dianggap dapat mengganggu kelanggengan negara. Oleh karena itu isu kesenjangan sosialekonomi, perbedaan, dan marjinalisasi ini ditutup oleh selimut integrasi yang dibangun dan diterapkan oleh negara dari atas.

Meski pada awalnya isu kesenjangan sosial ekonomi tidak langsung berkaitan dengan konflik Poso, isu ini telah berimplikasi negatif terhadap hubungan penduduk lokal dan pendatang pada masa konflik. Toko-toko di pasar Poso, mobil-mobil, rumah-rumah orang kaya, dan atribut lain yang menandai golongan yang memiliki modal, menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran oleh massa. Hampir tidak dapat lagi dibedakan antara aspek agama, ekonomi dan politik dalam konflik horizontal Poso. Meski pemicu awal adalah perkelahian dua pemuda berbeda agama, pemuda yang beragama Kristen yang penduduk lokal dan tengah menganggur dengan pemuda Muslim yang pendatang, ketiga aspek pokok kehidupan sosial tersebut melebur menjadi satu dalam kondisi konflik yang berlangsung.

7. Kambing hitam sebagai katub pengaman. Peristiwa konflik Poso (dan juga Maluku pada masa yang hampir bersamaan) telah mempopulerkan istilah *provokator*, yang dimaknai sebagai orang-orang tertentu yang secara sengaja menyulut permusuhan sehingga mendorong terjadinya kekerasan yang menelan korban. Istilah ini kemudian populer juga lebih meluas dan bahkan digunakan untuk bergurau sehari-hari.

Dalam sosiologi-antropologi *provokator* ini adalah semacam kambing hitam yang dicari-cari orang tatkala suatu persoalan konflik mencapai puncak titik jenuh. Manusia tidak dapat hidup selalu dalam kondisi keos, sehingga pada suatu saat kekacauan yang sudah berlangsung lama ingin dihentikan, namun tidak tahu mulai dari mana dan atas alasan apa. Secara alamiah, provokator menjadi jalan keluar yang relevan dan pas. Provokator adalah tempat pelampiasan benci, dendam, sakit hati, dan hal-hal buruk lainnya. Dengan melampiaskan segala hal yang buruk kepada provokator, maka kedua belah pihak yang berkonflik akan berada pada posisi aman seolah-olah konflik dan kekerasan berkepanjangan bukanlah karena salah mereka melainkan karena ulah pihak ketiga yang disebut provokator itu.

Provokator sebenarnya bukan sosok yang nyata, melainkan sesuatu yang dibayangkan seolah-olah nyata. Misalnya, dalam pernyataan di media massa pada tahun 2002, "awas provokator sudah berada di Pelabuhan Poso, masyarakat harus waspada", jelas menunjukkan bahwa provokator itu adalah seseorang atau orang-orang tertentu. Meski provokator itu tidak pernah tertangkap sosok sebenarnya, orang percaya provokator itu ada. Keadaan ini turut memperlunak hubungan pihak-pihak yang berkonflik yang sebelumnya tajam, seolah pihak ke tiga inilah biang sémua bencana yang ada, dan harus dihadapi bersama termasuk oleh kedua pihak yang berkonflik.

Ketika sejumlah senjata organik milik TNI-Polri ditemukan berada di tangan penduduk yang berkonflik, muncul dugaan baru bahwa provokator itu tak lain adalah oknum TNI-Polri. Seolah memberi jalan yang mulus bagi kecurigaan terhadap tentara dan polisi, aparat keamanan ini kemudian menjadi pokok isyu dan gossip bahwa konflik Poso didalangi oleh tokoh intelektual, yakni orang-orang TNI-Polri.

Institusi keamanan ini menjadi sasaran empuk pencitraan negatif hingga tahun 2007. Meski keduabelah pihak melakukan rekonsiliasi pada tahun 2007, pencitraan terhadap TNI-Polri tetap berlangsung. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk dengan mudah menuding aparat keamanan itu sebagai penyebab konflik, seraya bercerita bahwa pada masa lampau kehidupan etnik dan agama harmoni, mereka semua *basudara*, gotong royong, nilai *sintuwu maroso* berlaku dengan baik.

Konflik Dan Ragam penyelesaiannya. Dalam analisa sistem sosial kita memandang empat unsur pokok sistem, yakni organisasi sosial, ekonomi, politik, dan agama sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Setiap unsur memiliki potensi memicu konflik, sedang unsur-unsur lainnya menjadi landasan membenaran. Dalam kasus Poso, walaupun unsur agama menjadi pemicu pertama, ketiga unsur lainnya langsung ikut terlibat dalam proses konflik. Semakin lama konflik berlangsung semakin banyak unsur yang terlibat dan semakin berat akibat konflik yang akan ditanggung. Pembangunan ekonomi Poso secara makro yang dianggap meningkat sekitar 5,15 persen pada tahun 1997 dibandingkan tahun sebelumnya, terpuruk menjadi minus 4,78 persen pada tahun 2000, dengan nilai kerugian sekitar Rp 250 milyar.

Kerugian sosial yang dialami malahan lebih besar, karena kerugian ini tidak bisa ditakar dengan uang dan benda. Kerugian sosial ini adalah hancurnya pranata organisasi sosial yang berbasis nilai *sintuwu maroso* yang dinarasikan oleh penduduk sebagai pengikat integrasi masyarakat sejak jaman dahulu. Nilai ini diyakini oleh penduduk lokal tidak hanya menjadi kekuatan integratif masyarakat setempat (penduduk lokal) sebagai satu satuan kekerabatan luas tetapi juga penghormatan terhadap orang lain yang tidak sekerabat (pendatang).

Peranan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Poso terwujud dalam langkah-langkah berikut :

1. Deklarasi Malind. Pemerintah berinisiatif untuk mempertemukan delegasi kelompok Islam (kelompok putih) dengan kelompok Kristen (kelompok merah). Kelompok Islam terdiri dari 25 orang dan kelompok Kristen 24 orang. Deklarasi ini ditandatangani pada tanggal 20

Desember 2001 oleh kedua belah pihak yang berkonflik untuk menghentikan konflik dan kekerasan. Konflik terbuka berhasil dihentikan sementara setelah deklarasi, tetapi di sela-sela masa damai itu kekerasan Poso masih tetap terjadi. Kelemahan deklarasi adalah bahwa orang-orang yang menandatangani deklarasi tidak sama dengan yang mengalami kekerasan di lapangan. Kelompok yang menandatangani deklarasi tidak dapat mengatas namakan sepenuhnya massa warga kedua belah pihak yang banyak jumlahnya itu. Sebagian dari warga tidak hanya terlibat kekerasan tetapi juga menjadi korban, di antaranya kerabat yang tewas terbunuh, yang sukar melenyapkan kebencian dan dendam. Mereka ini secara diam-diam membalas kekerasan dengan kekerasan meski pun mengetahui bahwa perjanjian damai sudah ditandatangani.

2. Penempatan pasukan keamanan. Penempatan pasukan keamanan dilakukan untuk menjaga keamanan di Poso. Pada April hingga Juni 2000, Polda Sulawesi Tengah menggelar operasi keamanan bernama Operasi Sadar Maleo. Operasi digelar hingga lima tahap ini efektif mulai 1 Juli 2000. Ada 14 Satuan Setingkat Kompi (SSK) TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan Poso. Kodam VII Wirabuana yang membawahi Korem se Sulawesi juga menggelar Operasi Cinta Damai. Meski dapat menekan letupan pertikaian, hingga berakhirnya operasi tersebut pada tanggal 10 Desember 2001, hasilnya belum optimal. Karena Poso belum aman, pasukan keamanan ditambah hingga 23 SSK.

5.3. Kasus Konflik Di Perbatasan Papua Indonesia-Papua Niugini

Latar Belakang. Tulisan ini memusatkan perhatian pada wilayah perbatasan Papua Indonesia dan Papua Niugini. Kondisi geografi Papua secara menyeluruh tidak dibicarakan secara khusus. Yang dimaksud dengan wilayah perbatasan tersebut adalah semua kabupaten, kota, distrik, dan desa-desa yang terletak disepanjang garis pemisah, dan yang berhadapan langsung dengan, negara tetangga Papua Niugini (selanjutnya disingkat PNG).

Penduduk yang mendiami daerah sepanjang garis perbatasan ini sebenarnya sudah sejak lama menjalin hubungan secara tradisional dengan penduduk di PNG

atas dasar keturunan, kekerabatan, dan kebudayaan. Perbatasan darat Papua Indonesia (selanjutnya disingkat PRI) dengan PNG melintasi lima kabupaten, yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digul, dan Kabupaten Merauke.

Kondisi di wilayah perbatasan PRI-PNG saat ini dapat ditinjau dari beberapa, yakni kondisi geografi, ekonomi, sarana dan prasarana, politik, hukum, dan keamanan. Dari kelima kabupaten perbatasan itu kabupaten Jayapura di Utara dan kabupaten Merauke di Selatan termasuk yang paling maju, sedangkan ketiga kabupaten lainnya belum.

Panjang garis wilayah perbatasan darat antara PRI-PNG adalah 770 kilometer. Panjang garis ini adalah hasil perundingan antara RI-PNG melalui General Border Committee (GBC), yang menyepakati bahwa garis perbatasan dimulai dari Utara yakni Monumen Meridian 1 (MM 1) di Skouw-Wutung) sampai Selatan, yaitu MM 14, di Sungai Torasi yang ditandai oleh 52 buah tugu batas MM. Kondisi alam di sepanjang perbatasan keras, menantang, dan banyak daerah yang terisolasi.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di perbatasan kedua negara menggambarkan kesenjangan. Kondisi sosial-ekonomi di wilayah Indonesia lebih baik daripada di PNG. Oleh karena secara sosial-budaya masyarakat di wilayah Indonesia masih memiliki hubungan kerabat dengan masyarakat di PNG, dan pemisahan keduanya lebih disebabkan oleh politik, maka jalinan hubungan sosial mereka tetap terpelihara. Arus hubungan sosial sehari-hari kedua belah pihak terus berlangsung, baik dalam konteks silaturahmi maupun perdagangan tradisional melalui pintu-pintu tidak resmi. Adapun kegiatan perdagangan formal dengan nilai ekonomi tinggi antara kedua negara melalui pintu perbatasan masih sangat terbatas. Kondisi geografis yang sulit menyebabkan kelancaran arus perdagangan terkendala, kecuali bagi sedikit orang yang memiliki dana besar yang dapat menggunakan pesawat terbang. Sarana ini hanya dimiliki oleh misionaris, pemerintah, TNI dan Polri, dan swasta seperti Trigana, Wamena Cargo, dan sebagainya.

Jumlah patok perbatasan sangat sedikit dibandingkan panjang garis perbatasan yang 770 km itu. Selain itu kondisi patok batas sangat memprihatinkan,

banyak yang sudah nyaris terkubur dalam hutan belukar yang ganas sehingga tidak tampak lagi. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para separatis yang keluar masuk perbatasan kedua negara hampir tanpa hambatan karena luput dari pemantauan petugas perbatasan. Kondisi ini lebih diperburuk oleh ketidaktahuan masyarakat setempat mengenai posisi patok batas kedua negara itu. Lagi pula banyak penduduk yang tidak memiliki tanda pengenal seumpama kartu tanda penduduk atau sejenis, sehingga menyulitkan untuk mengupayakan perlindungan hukum atas hak-hak mereka.

Sebelum pemekaran kabupaten, wilayah perbatasan di sisi Indonesia terletak di empat kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah pemekaran, wilayah ini menjadi lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke, dan semuanya meliputi 23 wilayah kecamatan.

Dari lima kabupaten itu, kabupaten Keerom merupakan hasil pemekaran kabupaten Jayapura, sedangkan kabupaten Pegunungan Bintang adalah kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Jayawilaya, dan kabupaten Boven-Digoel adalah pemekaran dari kabupaten Merauke. Pintu atau pos perbatasan resmi hanya terdapat di Skouw, kecamatan Muara Tami, Kabupaten Jayapura, dan di kecamatan Sota, kabupaten Merauke.

Karakteristik Penduduk. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2002 adalah 1.444.791 jiwa. Jumlah penduduk terbesar adalah di Kabupaten Jayawijaya, yakni 423.275 jiwa. Secara rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama periode 1990-2000 adalah 3.18 persen. Apabila dikaitkan dengan luas wilayah, kepadatan penduduk di Propinsi ini adalah 6 jiwa per kilometer persegi. Jadi total penduduk di atas yang tergolong angkatan kerja adalah 1.106.078 orang sedangkan sisanya bukan termasuk angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 94.40 persen sudah bekerja sedangkan sisanya 3,51 persen (38.793 orang) adalah pencari kerja.

Di sepanjang wilayah perbatasan RI-PNG didiami tujuh kelompok masyarakat : empat kelompok masyarakat di Utara (Skouw, Arso-Waris, Senggi, dan Web), dua etnik di bagian tengah (Ngalum atau Lani), dan dua etnik di Selatan (Muyu dan

Marind Anim). Selain itu ada etnik-etnik kecil yang populasinya sedikit sehingga tidak dominan.

Penduduk di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Merauke bersifat heterogen karena terdiri dari beragam etnik Papua dan etnik pendatang (non-Papua). Heterogenitas penduduk di ketiga kabupaten/kota dimungkinkan karena adanya akses transportasi yang mendukung gerakan penduduk dari dan ke perbatasan. Selain itu daerah-daerah perbatasan merupakan sasaran program transmigrasi pemerintah. Keberhasilan transmigran di wilayah ini menimbulkan ketidakharmonisan dengan penduduk setempat, sehingga akhirnya pemerintah tidak lagi melanjutkan program tersebut.

Kalau pengelompokan etnik di atas diurai lebih rinci, maka setidaknya terdapat 57 etnik yang masing-masing hidup dalam lingkungan etniknya sendiri. Lima puluh tujuh kelompok etnik itu masih bisa diurai lebih kecil lagi menjadi 252 kelompok adat yang memiliki bahasa sendiri-sendiri. Walaupun pada satu sisi keragaman etnik ini merupakan kekayaan budaya yang penting, perbedaan-perbedaan yang ada juga merupakan potensi bagi terjadinya konflik-konflik antar etnik. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain oleh seringnya perang antar etnik pada kelompok-kelompok etnik tertentu di Papua.

Konflik Di Perbatasan Papua Indonesia-Papua Niugini. Konflik di perbatasan PI-PNG memiliki karakter yang unik karena memiliki dua dimensi yang berbeda namun terkait satu sama lain. Kedua dimensi itu adalah dimensi intrinsik-internal dan dimensi politik, dan keterkaitan keduanya adalah bahwa dimensi intrinsik-internal mendorong terjadinya dimensi politik dari konflik. Dimensi intrinsik-internal adalah konflik-konflik yang terjadi karena kondisi-kondisi dasar khususnya perbedaan menyolok sosial-ekonomi di berbagai daerah di Papua, termasuk perbedaan sosial-ekonomi antara penduduk setempat dan pendatang, perbaikan kesejahteraan yang tak kunjung datang meski sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia selama hampir setengah abad.

Adapun konflik-konflik internal yang secara tradisional terjadi di Papua, misalnya perang antar kelompok etnik yang seringkali terjadi, konflik-konflik itu tidak dibicarakan dalam kajian ini, meski pun disadari bahwa konflik-konflik jenis ini mungkin saja berimplikasi politis yang lebih luas. Konflik politik yang dibicarakan di

sini berpusat pada Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dapat dilihat sebagai puncak kulminasi proses intrinsik-internal. Dapat dikatakan bahwa kehadiran OPM di Papua setua masa Irian Barat masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah ini adalah uraian kategoris mengenai faktor-faktor yang kondusif bagi terwujudnya konflik-konflik di wilayah perbatasan PI-PNG.

1. Kesenjangan geografi, sosial, ekonomi. Barangkali Papua adalah salah satu wilayah Indonesia yang paling variatif secara geografi. Wilayah ini memiliki kondisi alam dengan kontur yang lengkap, mulai dari rawa, sungai, hutan belantara, lembah dan jurang yang sangat curam, dataran rendah yang luas, hingga gunung tertinggi di Indonesia. Kondisi alam seperti ini memberi corak dasar variasi kehidupan di Papua. Tidak mudah mencapai satu tempat ke tempat lain karena kendala-kendala alam itu. Alat komunikasi transportasi yang paling memenuhi dan dibutuhkan adalah pesawat terbang ukuran kecil hingga sedang. Di beberapa tempat yang sukar dibangun landasan biasa, pesawat helikopter sangat dibutuhkan.

Persoalan kendala geografis yang diutarakan di atas merupakan persoalan klasik bahkan sejak hampir setengah abad yang lalu, ketika Irian Barat (kini Papua) masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga sekarang isu komunikasi dan transportasi itu belum mampu dipecahkan, khususnya yang menyangkut kebutuhan rakyat banyak. Meski arus lalu lintas penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain di Papua semakin meningkat pada masa kini, tetapi hanya mereka yang punya uang banyak yang mampu bepergian dengan pesawat terbang. Sebagian besar warga masyarakat Papua nyaris belum berubah dari kondisi mereka sebelumnya.

Kesulitan geografis itu juga menyebabkan perhatian pemerintah (khususnya pemerintah Pusat) seolah-olah kurang pada daerah ini. Sebagaimana dikemukakan di atas sebagian besar wilayah perbatasan nyaris tak tersentuh, merupakan kawasan tertinggal, sarana dan prasarana yang sangat minim, dan masyarakatnya miskin. Kontrol negara terhadap wilayah perbatasan sangat terbatas karena keterbatasan sarana dan personil.

Dalam konteks sosial dan ekonomi terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok di antara daerah-daerah di Papua sendiri. Ada daerah-daerah yang relatif lebih maju baik pada tingkat kesejahteraan maupun pendidikan warga. Sebagai contoh orang Biak dikenal sebagai sumber orang-orang yang terdidik dan memiliki kesejahteraan lebih baik. Banyak orang Biak yang duduk di tampuk pemerintahan daerah, DPRD, pegawai negeri dan swasta, dan dosen-dosen di perguruan tinggi. Sejumlah tokoh OPM juga berasal dari Biak. Di sisi lain, ada kelompok etnik yang hampir tak tersentuh oleh pendidikan menengah dan tinggi, tingkat kesejahteraan mereka rendah, dan kemiskinan yang kronik.

2. Penduduk lokal dan pendatang. Semenjak Irian Barat masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, gelombang demi gelombang pendatang memasuki daerah ini. Para pendatang ini terdiri dari dua kategori : Pertama, mereka datang sebagai transmigran yang berada di bawah program nasional transmigrasi. Sebagaimana kita ketahui, program transmigrasi telah dilaksanakan semenjak pemerintahan Presiden Sukarno hingga Presiden Suharto, dan dipandang sebagai program nasional yang cukup berhasil. Para transmigran pada umumnya adalah orang Jawa. Program ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi lebih baik antara berbagai etnik di Indonesia yang selama ini hidup terpisah satu sama lain. Pendatang dan penduduk lokal diharapkan berbaur sehingga menciptakan integrasi yang lebih baik. Para transmigran sudah dipersiapkan sejak dari daerah asal. Mereka dilatih, diberi peralatan dan modal, dan diberangkatkan menurut jadwal tertentu. Di daerah baru, mereka tetap dibimbing selama setahun pertama, dan diberi lahan untuk tempat tinggal dan bertani.

Kedua, pendatang yang datang secara sukarela dan atas kehendak sendiri. Kaum pendatang ini tidak hanya berasal dari Jawa, tetapi juga dari etnik-etnik lain khususnya Bugis, Manado, Maluku, Batak, Bali, Minangkabau, dan lainnya. Mereka membawa modal sendiri dan mencoba membangun kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Karena datang atas keinginan sendiri, mereka biasanya memiliki motivasi yang kuat karena mereka menyadari bahwa apabila gagal, tidak akan ada yang menolong. Kategori pendatang ini biasanya lebih

"tangguh" daripada pendatang transmigran. Banyak di antaranya yang mulai hidup dari tingkatan paling bawah, tetapi kemudian menjadi orang-orang yang berhasil secara ekonomi.

Berbeda dari pendatang transmigran, pendatang sukarela pada umumnya memulai kehidupan baru di daerah perkotaan. Mereka melakukan apa saja, mulai dari menjadi buruh kasar, sopir angkot, petugas keamanan pasar, makelar, tukang parkir, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Banyak di antara mereka yang kemudian berhasil mendongkrak taraf kehidupan menjadi lebih baik. Pendatang transmigran nampaknya lebih konservatif. Mereka mengelola lahan yang disediakan pemerintah. Lahan itu biasanya berlokasi cukup jauh dari pusat-pusat kota. Hasil pertanian dijual sendiri ke kota atau melalui perantara yang secara tetap datang ke desa-desa. Lambat laun jaringan kaum pendatang transmigran dan pendatang sukarela terbentuk dan menjadi kuat karena sektor jasa di perkotaan juga dikuasai oleh kaum pendatang sukarela. Kondisi ini pada saat yang sama memperlebar jurang antara pendatang dan penduduk asli.

Kedua kategori pendatang di atas menjadi persoalan kesenjangan hubungan antara penduduk lokal dan pendatang pada masa kemudian. Kehadiran pendatang di Irian Barat (yang berubah nama menjadi Irian Jaya, kemudian Papua) tidak dengan sendirinya membangun pembauran yang harmonis sebagaimana diharapkan. Ritme dan kecepatan gerak pendatang dalam membangun kehidupan baru tidak sejalan dengan rutinitas kegiatan penduduk setempat yang telah terbiasa dan nyaman dengan corak kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Mereka hidup aman dalam genggamannya alam.

Pada masa Orde Baru kesenjangan sosial-ekonomi antara pendatang dan penduduk lokal tidak mengemuka meski pun sudah cukup serius. Pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah Orde Baru tidak memberi peluang bagi gerakan politik apa pun yang dipandang membahayakan negara. Ketidaksenangan dan antipati terhadap pendatang semakin menguat namun tidak bisa dieskpresikan secara terbuka, sehingga gerakan-gerakan anti pendatang lebih banyak diwujudkan dalam bentuk-bentuk tersembunyi. Organisasi Papua

Merdeka (OPM) adalah saluran terpenting dalam menyatakan sikap anti pendatang (yang berarti juga sikap anti pemerintah pusat).

3. Rambut keriting vs rambut lurus. Harapan program nasional transmigrasi semenjak pemerintahan Presiden Sukarno agar kelak terjadi pembauran antar etnik ternyata tidak tercapai. Perkawinan warga etnik lokal dan etnik pendatang sebagaimana dicita-citakan dapat dikatakan tidak berhasil. Sangat kecil frekuensi perkawinan antara etnik pendatang dengan etnik lokal. Akan tetapi cukup tinggi frekuensi perkawinan antara sesama etnik pendatang seperti Bugis-Maluku, Jawa-Bugis, Manado-Batak, Jawa-Bali, Minang-Jawa, dan sebagainya. Keadaan ini justru memperlebar jarak antara kaum pendatang dan penduduk setempat.

Perbedaan antar kebudayaan (dalam hal ini etnik sebagai contoh) dipelihara dan bahkan dipertajam melalui stereotip dan prasangka. Stereotip adalah suatu penilaian subyektif yang dikenakan kepada suatu kategori sosial seperti warga etnik, penganut agama, ras, atau golongan. Apabila stereotip itu dimuati oleh penilaian negatif atau buruk maka prasangka berkembang. Kaum pendatang seringkali dilabel dengan satu kesatuan kategori, yakni orang berambut lurus atau orang Jawa. Meski penduduk setempat mengetahui bahwa etnik pendatang itu beranekaragam namun mereka menyamakan begitu saja menjadi satu kategori, yakni orang Jawa yang berambut lurus.

Pembedaan konsep rambut lurus bersifat fungsional untuk membedakannya dari penduduk setempat (suatu kategori besar orang Papua) yang dikategori sebagai berambut keriting. Konsep rambut keriting kemudian dikembangkan lebih meluas bahwasanya penduduk setempat mirip atau sama dengan penduduk di kawasan Melanesia di wilayah timur Papua yang luas termasuk penduduk di pulau-pulau di samudera Pasifik. Dengan kata lain, secara geografi-politis penduduk "asli" Papua menyamakan diri mereka dengan penduduk di kawasan Melanesia atas dasar ciri ras, dan membedakan dari penduduk Indonesia lain yang memiliki ciri ras yang berbeda samasekali. Para tokoh OPM kerap kali mengangkat isu ras ini untuk membenarkan perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari NKRI dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembedaan kedua kategori berdasarkan ras membuat hubungan antar etnik, pendatang dan penduduk "asli", kerap kali memanas. Terutama pada masa setelah berakhirnya Orde Baru (1998) hubungan kedua kategori ini semakin rentan. Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu meningkatnya semangat kedaerahan yang sebelumnya tersembunyi di bawah permukaan. Peluang untuk mengangkat perbedaan menjadi penguasaan sumber daya membesar dalam beberapa tahun terakhir. Simptom-siptom yang dapat kita identifikasi antara lain maraknya unjuk rasa menuntut kembali hak ulayat atas tanah, kerusuhan akibat perbedaan tafsiran batas-batas lahan, kerusuhan akibat tapal batas desa, bentrokan antara buruh dengan polisi karena tuntutan kenaikan upah minimal, penyerangan massa terhadap pos polisi karena telah menahan seorang warga yang melanggar hukum, bentrokan antar warga desa karena pemilihan kepala desa yang dianggap curang, dan sebagainya. Dalam skala yang lebih besar, pemekaran wilayah dan penambahan propinsi di Papua adalah salah satu akibat dari kecenderungan meningkat konflik-konflik tersebut.

4. *All our kin* dan pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan diterapkan di wilayah perbatasan Papua atas dasar pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan lokasi-lokasi yang tinggi interaksi penduduk, dan juga besarnya peluang untuk melintas batas secara ilegal. Pos-pos penjaga di perbatasan yang sangat minim dan memprihatinkan kondisinya membuka peluang besar tidak hanya bagi pedagang pelintas batas tetapi juga bagi anggota OPM yang bersembunyi di PNG. Beberapa kali kontak senjata terjadi antara TNI-Polri dengan OPM di sepanjang garis perbatasan itu.

Sesungguhnya pendekatan keamanan oleh TNI-Polri di perbatasan pada masa kini jauh lebih kondusif daripada masa lalu. Hal ini nampak dari cukup santainya hubungan petugas keamanan dengan penduduk yang berlalu-lintas di tempat itu. Meski tetap waspada petugas tetap memberikan keleluasaan kepada penduduk untuk berjual-beli di wilayah Indonesia maupun di PNG. Interaksi sosial, khususnya perdagangan lokal ini sukar sekali dikendalikan secara ketat karena warga etnik yang terlibat pada umumnya serumpun. Hanya karena perbedaan negara dan

pemerintahan yang membuat mereka secara politis terpisah satu sama lain. Banyak peristiwa kekerabatan yang dilaksanakan oleh kelompok besar kerabat yang harus dihadiri oleh para anggotanya, baik yang tinggal di wilayah RI maupun PNG. Dalam hal ini petugas keamanan memberikan keleluasaan tertentu agar mereka dapat menghadiri ritus-ritus tersebut.

Kebijakan keamanan yang berbasis realitas sosial dan kebudayaan ini adalah hasil belajar dari masa lampau. Ketika pendekatan keamanan dilakukan secara ketat pada masa Orde Baru, korban di pihak penduduk setempat maupun TNI-Polri cukup besar. Pada awal 1990an, di Pos Sota, Merauke, terjadi bentrokan antara TNI-Polri dengan penduduk setempat yang disangka melarikan diri ke wilayah PNG. Petugas keamanan yang berusaha mencegah penduduk untuk melintas batas pada waktu itu tidak memahami bahwa mereka bermaksud menghadiri ritus kerabat di wilayah PNG. Komunikasi bahasa yang tidak lancar akhirnya membuahakan kekerasan. Ketika pada malam harinya penduduk secara sembunyi-sembunyi melintasi batas, petugas yang mengetahui hal itu melepaskan tembakan sehingga beberapa penduduk tewas dan luka-luka. Kejadian itu dimanfaatkan oleh OPM untuk menyerang balik Pos Keamanan Sota sehingga jatuh beberapa korban di pihak TNI-Polri. Pada masa reformasi pendekatan keamanan yang ketat itu diubah menjadi pendekatan keamanan yang kondusif yang dikembangkan atas dasar realitas sosial dan kebudayaan.

5. Perlawanan melalui agama. Meski sebagian besar penduduk "asli" Papua beragama Kristen, doktrin agama mereka sesungguhnya telah mengalami proses sinkretisme dengan agama lokal yang banyak sekali variasinya di daerah ini. Sebagian penduduk setempat malahan tidak memandang diri mereka sebagai penganut Kristen, dan memandang gereja hanya sebagai tempat mereka melaksanakan ritus kepercayaan yang sudah dimodifikasi.

Tidak semua perlawanan terhadap pemerintah, khususnya pemerintah Pusat, diwujudkan secara kekerasan bersenjata. Perlawanan OPM juga dilakukan melalui doktrin dan kegiatan agama di gereja-gereja tertentu. Peribadatan dikemas bersama dengan isu-isu

dan pesan-pesan perlawanan. Jemaat menyanyikan lagu-lagu keagamaan yang disusupi pesan-pesan perlawanan. Mereka juga membuat syair-syair yang dibacakan pada saat peribadatan gereja.

Ada banyak variasi gereja dan peribadatan di Papua. Hal ini menyebabkan peluang untuk mengembangkan gaya agama Kristen tertentu terbuka. Sikap para pendeta dan pastor Kristen juga bervariasi. Pihak gereja missionaries yang bertugas menjalankan ajaran Kristen secara murni tidak setuju dengan pencampuran doktrin agama Kristen dengan kepercayaan lokal dan isu perlawanan. Sikap pihak gereja misionaris itu mengundang reaksi masyarakat lokal yang kemudian melabel gereja misionaris sebagai perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah. Apalagi gereja-gereja yang bernaung di bawah Majelis Wali Gereja Indonesia (MAWI) dan Persatuan Dewan Gereja Indonesia (PDGI) dianggap sebagai kaki tangan pemerintah pusat.

Gereja perlawanan disukai terutama oleh kaum muda. Mengetahui sikap gereja-gereja misionaris itu kaum muda memilih gereja perlawanan karena merasa lebih bebas mengekspresikan pikiran dan pendapat. Mereka bahkan diberi kesempatan mengubah lagu atau syair perlawanan yang nanti diperdengarkan pada waktu peribadatan. Suatu gereja perlawanan di Biak bahkan sudah merekam syair-syair perlawanan gereja dalam kaset dan dibagikan untuk jemaah dengan membayar sedikit.

Refleksi : Hakikat Konflik Di Perbatasan Papua Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita. Konflik-konflik di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini memiliki karakter yang khas karena :

1. Dalam konflik-konflik ini penduduk "asli" menggunakan basis ras untuk menjelaskan dan membenarkan perbedaan-perbedaan dengan penduduk pendatang. Perbedaan ras ini kemudian berimplikasi pada penggunaan atribut etnik, agama, dan golongan. Dengan penggunaan ras, maka relevansi perlawanan diperluas keluar Papua, dan menjangkau wilayah Melanesia yang luas, termasuk Papua Niugini.
2. Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kerap kali dilihat semata-mata sebagai kelompok bersenjata yang kadangkala muncul mendadak mengganggu keamanan. Organisasi ini semata-mata dipandang sebagai

kelompok separatis, yang jumlah anggotanya relatif kecil. Gerakan ini sebenarnya bukan persoalan kecil melainkan suatu akibat akumulatif dari banyak persoalan yang kompleks dan berjangka lama. Persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan ketidakadilan sudah di alami oleh penduduk "asli" Papua semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia masa Sukarno, Indonesia masa Orde Baru Suharto, hingga kini. Otonomi daerah yang dijalankan pada masa reformasi ternyata tidak menampakkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebenarnya sudah menjadi ide dan keyakinan yang tersebar di semua lini penduduk "asli" Papua. Ide dan keyakinan itu ada di hutan-hutan, gunung-gunung, desa dan kota, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, hingga birokrasi pemerintahan. Kalangan penduduk "asli" yang terdidik, yang kini makin banyak jumlahnya, tidak hanya menyuarakan gagasan OPM secara internal di Papua, melainkan sudah menjadikannya isu internasional. Persoalan ini sudah menjadi isu dan agenda Komisi Hak Masyarakat Asli (the Commission of Indigenous People Rights) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa.
4. Mengalahkan gagasan perlawanan ini tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan dan militer, melainkan dengan tindakan nyata menyejahterakan masyarakat yang bersangkutan, memperlakukan mereka secara adil, dan menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi dengan kaum pendatang.

5.4. Memetakan Konflik Sosial. Perlu dinyatakan sejak awal bahwa pemetaan konflik bersumber pada pendekatan makroskopik atas konflik. Pendekatan ini sangat penting bagi kita yang mengkaji konflik dalam konteks makro, namun kurang membantu apabila kita menganalisa situasi konflik yang spesifik. Berikut ini suatu contoh pedoman untuk memetakan konflik spesifik.

5.1.5 Pedoman Pemetaan Konflik. Pemetaan adalah langkah pertama dalam mengintervensi suatu konflik. Pedoman ini memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang asal-usul, dinamika, dan kemungkinan bagi resolusi konflik. Karena suatu konflik adalah proses sosial dan secara terus-menerus berubah, setiap peta akan sah hanya untuk suatu masa tertentu dan harus

diperbaharui secara berkala. Suatu peta seharusnya mencakupi informasi sebagai berikut :

1. Deskripsi ringkas.
2. Sejarah konflik. Asal-usul dan kejadian-kejadian penting dalam perkembangannya baik konflik itu sendiri maupun konteksnya. Penting dibedakan antara hubungan konflik interaktif pihak-pihak yang terlibat, dan konteks di mana konflik tersebut terjadi.
3. Konteks konflik. Penting dipelajari ruang lingkup dan karakter dari konteks atau setting yang didalamnya konflik terjadi. Dimensi tersebut merupakan batas-batas geografi; struktur politik, hubungan-hubungan, dan yurisdiksi; jaringan komunikasi dan pola-pola; metode pengambilan keputusan.
4. Pihak-pihak yang berkonflik. Satuan-satuan yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam konflik dan memiliki andil yang signifikan dalam hasilnya.
 - a. Primer : Pihak-pihak yang memiliki tujuan yang tak tergantikan, berinteraksi langsung untuk mencapai tujuan. Jika pihak-pihak yang berkonflik adalah organisasi atau kelompok, setiapnya terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil yang berbeda-beda dalam kadar keterlibatan mereka dalam konflik.
 - b. Sekunder : Pihak-pihak yang memiliki andil tidak langsung dalam hasil persengketaan tetapi mereka sendiri tidak merasa secara langsung terlibat. Ketika konflik berlanjut pihak-pihak sekunder bisa menjadi primer dan sebaliknya.
 - c. Pihak-pihak ketiga yang berkepentingan : Pihak-pihak yang berminat atau menaruh perhatian dalam upaya sukses resolusi konflik.

Selain informasi mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat, kita perlu memahami pula ciri-ciri dasar hubungan kekuasaan di antara mereka (misalnya, hubungan simetri atau asimetrik); kepemimpinan; tujuan setiap pihak yang berkonflik; potensi untuk membangun koalisi di antara pihak-pihak yang berkonflik itu.

5. Isu. Biasanya, suatu konflik akan berkembang di seputar satu atau lebih isu yang muncul dari atau menjerus kepada keputusan untuk berkonflik. Setiap isu dapat dipandang sebagai titik ketidaksepakatan yang harus dipecahkan. Isu-isu dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menurut faktor yang menghasilkannya:
 - a. Berbasis fakta : Ketidaksepakatan atas *apa* karena bagaimana pihak-pihak mempersepsikan *apa*. Penilaian dan persepsi adalah generator penghasil konflik primer dalam hal ini.
 - b. Berbasis nilai : Ketidaksepakatan atas *apa* yang seharusnya penentu dari suatu keputusan kebijakan, suatu hubungan atau sumber konflik yang lain.
 - c. Berbasis kepentingan : Ketidaksepakatan mengenai *siapa akan mendapat apa* dalam distribusi sumberdaya yang terbatas (misalnya, kekuasaan, privilese, keuntungan ekonomi, penghargaan).
 - d. Non-realistik : Yang berasal dari sumber selain yang disebut di atas. Gaya interaksi yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat, kualitas komunikasi antara mereka, atau aspek-aspek tataran fisik seperti ketidaknyamanan tempat.
6. Dinamika. Konflik sosial mengandung kesamaan meski tidak selalu merupakan dinamika yang dapat diprediksi yang apabila ditemukan dapat membantu kita untuk menemukan jalan di sekitar konflik. Kita harus berupaya membalik dinamika ini menjadi regulasi dan resolusi. Kita perlu mengenal hal-hal berikut :
 - a. Peristiwa-peristiwa yang muncul menandai mengemukanya persengketaan.
 - b. Kemunculan, transformasi, proliferasi isyu. Isyu-isyu berubah ketika konflik berkembang – isyu-isyu spesifik menjadi umum, isyu tunggal menjadi banyak, ketidaksepakatan yang bukan pribadi menjadi pribadi.
 - c. Polarisasi. Ketika pihak-pihak yang terlibat mengupayakan konsistensi dan koalisi internal dengan para sekutu, dan para pemimpin mengkonsolidasi posisi, pihak-pihak yang berkonflik

cenderung kearah bipolar yang dapat menjurus kepada semakin besarnya intensitas, simplifikasi, dan resolusi konflik.

- d. **Spiralisasi.** Melalui proses sebab-akibat timbal-balik, setiap pihak yang berkonflik dapat mencoba meningkatkan rasa kebencian atau kerusakan pada lawan. Spiral menurun juga bisa terjadi, di mana pihak-pihak yang berkonflik secara timbal balik mengurangi kebencian dan kekakuan interaksi.
 - e. **Stereotip dan bayangan cermin.** Pihak-pihak yang terlibat kerap kali membayangkan pihak lawan sebagai representasi impersonal bayangan cermin yang berlawanan dari diri mereka. Proses ini mendorong terjadinya posisi yang kaku, miskomunikasi dan salah tafsir di antara pihak-pihak yang berkonflik.
7. **Jalan Alternatif bagi Pemecahan Masalah.** Setiap pihak dan kerap kali juga pihak-pihak yang tidak terlibat pasti menginginkan pemecahan konflik. Tentang konflik dalam kerangka pembuatan kebijakan formal, pilihan dapat merupakan rencana formal. Dalam konflik antar pribadi, alternatif dapat berupa perubahan perilaku bagi/oleh pihak-pihak yang berkonflik.
8. **Potensi Pengaturan Konflik.** Dalam dan bagi setiap situasi konflik akan ditemukan sumber-sumber untuk membatasi dan mungkin menyelesaikan konflik. Proses pemetaan harus mencatat sumber-sumber ini, sedapat mungkin sejak awal. Sumber-sumber tersebut adalah :
- a. Faktor-faktor pembatas internal seperti nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik, atau nilai-nilai intrinsik hubungan di antara keduanya yang tidak ingin merusak, atau menekan pihak lain, akan dapat menghambat konflik.
 - b. Faktor-faktor pembatas eksternal seperti otoritas yang lebih tinggi atau dapat mengintervensi dan memaksakan perdamaian atau mengusahakan jalan tengah dari luar konflik.
 - c. Pihak ketiga yang netral maupun berkepentingan yang dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik yang dapat memfasilitasi komunikasi, menengahi persengketaan, atau melokasikan sumber keuangan sehingga masalah kesenjangan diminimalisasi.

- d. Teknik-teknik manajemen konflik, baik yang akrab dengan pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak ketiga, atau pihak-pihak lain yang dapat dimanfaatkan. Metode tersebut berkisar dari mediasi yang dikenal baik, konsiliasi, dan pengendalian desas-desus yang memecah belah hingga memperpanjang waktu untuk mendorong perdamaian.
9. Penggunaan Peta. Peta konflik paling berguna sebagai langkah awal intervensi konflik. Pemetaan memberi informasi apakah intervensi dapat dilanjutkan. Peta juga berguna dalam membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk bergerak ke belakang dan menjadikan masuk akal bagi proses yang tadinya mereka anggap sudah tertutup. Jika peneliti yang membuat peta ingin melakukan intervensi lebih jauh, menggunakan peta bersama-sama pihak yang berkonflik akan memudahkan jalan menuju pemecahan konflik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan. Dari uraian di atas beberapa akar penyebab konflik dan berbagai usaha rekonsiliasi telah diuraikan. Hal ini tentunya belum menjawab seluruh permasalahan yang ada. Oleh karena itu dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Isu penduduk asli dan pendatang, baik di Poso atau Papua ataupun berbagai daerah dalam konteks nasional sering menjadi isu yang dapat menyulut konflik horisontal, akibat dipolitisasi untuk kepentingan politik dan ekonomi. Untuk meminimalisasi benih konflik di masa datang, istilah penduduk asli dan pendatang perlu dihapuskan. Apabila tidak memungkinkan perlu dibuatkan parameter penduduk asli dan pendatang secara nasional dalam konteks ke-Indonesiaan, guna dijadikan acuan dasar bagi daerah dalam membangun partisipasi.
2. Komposisi jabatan berdasarkan rasio etnisitas dan agama, maupun putra daerah atau bukan seringkali dijadikan isu penting dalam konflik horisontal di Indonesia, baik dalam level lokal maupun nasional. Oleh karena itu perlu dibangun konsensus bahwa secara nasional alokasi jabatan-jabatan publik adalah berdasarkan profesionalisme, bukan etnis atau agama ataupun putra daerah atau bukan.
3. Perlu mengintensifkan dialog antar tokoh masyarakat (umat beragama dan atau tokoh adat) di masing-masing daerah secara berkala. Dengan seringnya dialog antar tokoh agama dan atau adat, maka upaya provokator untuk membawa konflik kepentingan ke dalam sebuah konflik komunal (adat atau agama) dapat dicegah sedini mungkin. Dialog juga diadakan antara tokoh dan masyarakatnya agar terjadi komunikasi timbal balik yang baik.
4. Menciptakan suasana aman di wilayah Poso dan Papua adalah suatu keharusan karena rasa aman merupakan prasyarat bagi perdamaian dan untuk mengembalikan masyarakat kepada kehidupan normal. Untuk itu perlu penegakan peraturan dan hukum yang lengkap dengan kepastian pelaksanaannya dalam menangani setiap kekerasan atau

kerusuhan masal, guna mencegah diarahkannya kekerasan masal menjadi konflik komunal.

5. Dalam rangka pengembangan ekonomi, perlu adanya dorongan pemerintah untuk mengubah pandangan, bahwa penduduk asli bergerak di bidang pertanian dan pendatang bergerak di bidang perdagangan.
6. Pemerintah perlu memberikan perhatian pada pengembalian aset-aset masyarakat seperti tanah, kebun, rumah kepada pemilik yang sah. Selain itu masyarakat juga diberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan untuk mengembalikan masyarakat kepada kehidupan yang normal.
7. Dalam jangka pendek pemerintah perlu memberikan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban konflik tanpa membedakan etnis dan agama, seperti bantuan-bantuan langsung dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi. Kemudian untuk jangka menengah diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu menekan ketidakadilan sosial-ekonomi penduduk antar kecamatan, etnis maupun agama. Dan jangka panjangnya adalah adanya pandangan pendidikan bangsa untuk menghilangkan konflik, yaitu melalui proses pendidikan generasi penerus (salah satu contoh dengan mendirikan Taman Mini Intelektual Muda Indonesia / TMIM).

6.2. Saran.

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk daerah konflik yang lain agar didapatkan data yang lebih beragam, sehingga langkah penyelesaian konflik yang terjadi tepat mengenai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2003 Identitas Dan Krisis Budaya Membangun Multi Kulturisme Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Pra Kongres Kebudayaan V Tahun 2003 Di Bali
- Bolong, Zainudin, 2002 Lokalitas Nasionalitas Dan Globalitas, Suatu Prerspektif Kebudayaan, Makalah Disajikan Pada Temu Budaya Sulawesi Tengah.
- Brown, Michael, (2000), Editor, Nationalism and ethnic conflict.
- Koentjoroningrat, Peny, 1975 Manusia Dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta, Jambatan.
- Mamar, Sulaiman, 2002 Konflik Dan Kekerasan, Makalah Disajikan Pada Temu Budaya Sulawesi Tengah Di Palu, September 2003
- Mamar, Sulaiman Dkk, 2002 Respon Militer Terhadap Konflik Sosial Di Poso, Palu; Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah.
- Sedyawati, Edi Dkk 2001 Permasalahan Integrasi Dan Desintegrasi Bangsa : Penggunaan Simbol-Simbol Budaya, Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Budaya Lpui, Jakarta
- Usop, 2003 Konsep Politik Dan Strategi Kebudayaan Indonesia Identitas Budaya Aku Dalam Budaya Lokal, Nasional, Global, Makalah Pada Pra Kongres Kebudayaan V Tahun 2003 Di Bali.
- Botman, Russel and Petersen Robin,. 1996, To Remember And To Heal, Human & Rousseau, Cape Town Pretoria Johannesburg.
- Camay, Phiroshaw and Gordon, Anne. J, 1998, Adocacy in Southern Africa Lessons for the Future, HOGE Presentations and Graphics, Johannesburg - South Africa
- Galtung, Johan. 1996, Peace by Peaceful Means, SAGE Publications, London - Thousand Oaks - New Delhi.
- Malik, Ichsan, dkk, 2003, Menyeimbangkan Kekuatan, KEMALA, Jakarta - Indonesia.
- 2003, BAKUBAE, The Community Based Movement For Reconciliation Process in Maluku, LSPP, Jakarta Indonesia
- 2001, Konflik Bahaya atau Peluang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Indonesia
- 2003, Mematahkan Kekerasan Dengan Spirit BakuBae, YAPPIKA, Jakarta Indonesia.
- Van der Merwe, Hugo, 2002, The Truth and Reconciliation Commission and Community Reconciliation, Center For The Study of Violence and Reconciliation, Johannesburg - South Africa.